

**Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Barat
Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat
(Studi Pada Desa Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**



**Jesy Natalia Diwisandi
NIM. 135030101111074**

**Universitas Brawijaya
Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan Administrasi Publik
Malang
2018**

MOTTO

Pencobaan-pencobaan yg kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yg tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya

(1 Korintus 10: 13)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Barat Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Ngadilangkung)

Disusun oleh : Jesy Natalia iwisandi

NIM : 135030101111074

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Publik

Malang, 28 Desember 2017

Komisi Pembimbing



Dr. Mardiyono, M.PA
NIP. 19520523 197903 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah berhasil dipertahankan dihadapan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2018
Waktu : 09.00 WIB

Sebuah skripsi

Oleh : Jesy Natalia Diwisandi
Judul : Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Barat Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang)

Dan telah dinyatakan **LULUS**

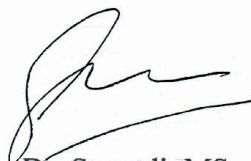
MAJELIS PENGUJI

Ketua



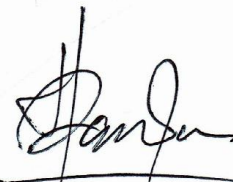
Dr. Mardiyono, M.PA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.ÂP
NIP. 2011078512141001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, sereta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasaal 70).

Malang, 28 Desember 2017

Mahasiswa,



Jesy Natalia Diwisandi
NIM. 135030100111074

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, karena pada akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, untuk segala cinta kasih-Nya kepadaku, untuk setiap penyertaan dan segala karunia yang diberikan-Nya, untuk segala pertolongan yang tidak pernah terlambat dan selalu pada waktu-Nya.
2. Papa Dan Mama, Hadi Wibowo, ST dan Susana J. E Dekock, untuk dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Makasih ya Mama dan Papa, selalu mendoakan aku. Terima kasih untuk selalu percaya dan mendukungku, untuk selalu memberikan nasihat dan kekuatan agar dapat melewati semuanya dengan baik.
3. Kakak Wina dan Adik Albert, untuk tawa dan canda, untuk segala sesuatu yang selalu kita bagi. Terima kasih, untuk selalu ada kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan yang ada. Terima kasih untuk keberadaannya sehingga kakaknya ini tidak stress dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
4. Pak Dr. Mardiyono, M.PA atas bimbingannya selama ini. Terima kasih untuk kesabaran, kebaikan dan kelembutan hati dalam menghadapi saya sebagai anak bimbingan.
5. Untuk “Ubur-ubur” yang selalu membantu waktu aku bingung dan selalu memberi semangat waktu aku udah nyerah
6. Untuk “Keluarga Bohay (Amalia, Merry, Mareta, Nike)” yang selalu memarah waktu aku malas buat menulis, memberi banyak waktu untuk membantuku
7. Saudara Firman Roganda yang selalu ada jika penulis butuh, yang bersedia mengantarkan penulis ke lokasi penelitian, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis

Keterbatasan waktu dan tempat membuat penulis tidak dapat menuliskan satu per satu semua pihak yang telah turut andil dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis hanya bisa berdoa semoga Tuhan YME selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin.

RINGKASAN

Jesy Natalia Diwisandi, 2017, Dampak pembangunan Jalan Lingkar Barat terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang) Dr. Mardiyono, M.PA, 99 Hal + xiii.

Skripsi ini ditulis berdasarkan pemikiran bahwa terjadi dilema pada pembangunan jalan Lingkar Barat. Disatu sisi pemerintah dihadapkan pada upaya penyediaan fasilitas jalan sebagai penunjang perpindahan ibukota kabupaten malang ke kepanjen. Di sisi lain pembangunan jalan membawa kosekuensi berkurangnya lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Hal ii berarti telah terjadi perubahan pola pemanfaatan lahan yang mengakibatkan perubahan aspek sosial ekonomi pada masyarakat yang merasakan langsung perubahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebagai akibat pembanunan jalan lingkar barat di desa ngadilangkung khususnya dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut makan dilakukan sebuah penelitian dengan metode kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten malang. Desa Ngadilangkung menjadi lokasi pembangunan Jalan Lingkar Barat.

Dampak terhadap aspek perekonomian di desa ngadilangkung ditandai oleh meningkatnya harga tanah, berubahnya mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, dan meningkatnya pasokan barang konsumsi dengan harga yang lebih murah. Dampak terhadap aspek sosial di desa ngadilangkung ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan dan mudahnya akses jalan.

Kata Kunci : Jalan Lingkar Barat, Dampak Sosial, Dampak Ekonomi

SUMMARY

Jesy Natalia Diwisandi, 2017, Impact of West Ring Road Development on Socio-Economic Community (Study on Ngadilangkung Village, Malang Regency). Mardiyono, M.PA, 99 + xiii.

This thesis is written based on the idea that there is a dilemma in the construction of West Ring road. On the one hand the government is faced with efforts to provide road facilities to support the displacement of the capital of Malang regency to kepanjen. On the other hand, road construction brings the consequences of reduced agricultural land for non-agricultural activities. It means that there has been a change of land use pattern which resulted in the change of socio-economic aspect to the community who felt the change directly.

This study aims to identify changes occurring as a result of the development of the western ring road in Ngadilangkung village, especially the impact on the socio-economic condition of the community. To achieve these objectives, a study was conducted using qualitative methods.

This research was conducted in Ngadilangkung Village, Kepanjen Sub-district, Malang Regency. Ngadilangkung village became the location of West Ring Road construction.

The impact on the economic aspects of Ngadilangkung village is marked by rising land prices, changing livelihoods from agriculture to non-agricultural sectors, and increasing supply of consumer goods at lower prices. The impact on social aspect in ngadilangkung village is marked by the increasing of quality of education and health and easy access of road.

Key Words : West Ring Road, Social Impact, Economic impact

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karna atas Berkat dan Perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Selesaiannya laporan skripsi ini juga tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Dr. Mardiyono, M.PA Selaku Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan
5. Kepala BAPPEDA yang memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian
6. Kepala Desa Ngadilangkung yang memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih .

Malang, 11 Januari 2018

Jesy Natalia Diwisandi

135030101111074

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| MOTTO..... | i |
| TANDA PERSETUJUAN | ii |
| TANDA PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kontribusi Penelitian | 5 |
| E. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Pengertian Administrasi Publik | 9 |
| B. Kebijakan Publik..... | 10 |
| 1. Pengertian Kebijakan..... | 10 |
| 2. Proses Kebijakan | 12 |
| 3. Evaluasi Kebijakan | 14 |
| 4. Dampak Kebijakan | 16 |
| C. Pembangunan..... | 19 |
| 1. Pengertian Pembangunan..... | 19 |
| 2. Konsep Pembangunan | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Infrastruktur Transportasi | 24 |
| D. Teori dampak sosial pembangunan..... | 26 |
| E. Sosial Ekonomi Masyarakat | 27 |
| 1. Perubahan Sosial..... | 27 |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi | 28 |
| F. Teori Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan | 30 |
| 1. Dampak Sosial | 30 |
| 2. Dampak Ekonomi | 31 |
| G. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial ekonomi | 32 |
| 1. Faktor Internal | 32 |
| 2. faktor eksternal | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Fokus Penelitian..... | 40 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian..... | 41 |
| D. Sumber Data | 41 |
| E. Instrumen Penelitian | 42 |
| F. Analisis Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 47 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Malang..... | 47 |
| 2. Gambaran Umum Kecamatan Kepanjen | 54 |
| 3. Gambaran Umum Desa Ngadilangkung..... | 55 |
| 4. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Malang..... | 58 |
| 5. Gambaran umum Jalan Lingkar Barat..... | 62 |
| B. Penyajian Data Fokus | 64 |
| 1. Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang..... | 64 |
| 2. Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Ekonomi Setelah Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang..... | 79 |
| C. Pembahasan | 82 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang..... | 82 |
| 2. Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Ekonomi Setelah Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang..... | 91 |
| BAB V PENUTUP..... | 94 |
| A. Kesimpulan..... | 94 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |

DAFTAR TABEL

| No | Judul | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| Tabel 1 | :Indikator Evaluasi Kebijakan..... | 14 |
| Tabel 2 | :Tabel Jumlah Penduduk di Kabupaten Malang | 46 |
| Tabel 3 | :Sarana dan prasarana pendidikan..... | 61 |
| Tabel 4 | :Prasarana Kesehatan..... | 63 |
| Tabel 5 | :Jumlah Lembaga Keamanan di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalibar)..... | 65 |
| Tabel 6 | :Jumlah Anggota Paguyuban SM di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang Tahun 2016 | 66 |
| Tabel 7 | :Jumlah Sentra Perdagangan di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang setelah Adanya Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalibar)..... | 68 |
| Tabel 8 | :Harga Satuan Tanah di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang pada Tahun 2012 Hingga Tahun 2016 | 69 |
| Tabel 9 | :Perubahan Mata Pencarian Masyarakat di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalibar)..... | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| Gambar 1 | : Proses Kebijakan | 11 |
| Gambar 2 | : Model Analisis Data Interaktif | 42 |
| Gambar 3 | : Peta Wilayah Kabupaten Malang | 44 |
| Gambar 4 | : Peta Wilayah Kecamatan Kepanjen | 51 |
| Gambar 5 | : Peta Wilayah Desa Ngadilangkung | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang menduduki peringkat kedua sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Malang mempunyai koordinat $112^{\circ}17'$ sampai $112^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ sampai $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan berbagai kota maupun kabupaten lain seperti batas wilayah bagian utara terdapat Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu, batas wilayah bagian timur terdapat Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo, batas wilayah bagian selatan terdapat Samudra Hindia dan batas wilayah bagian Barat terdapat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Dalam Pembagian secara administratif, Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Sejak tahun 2008, Kepanjen merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagai pusat dari ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen dituntut untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang agar dapat menjadi kota yang berkembang. Pembangunan menurut Siagian diartikan sebagai upaya sadar suatu negara untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan menuju masyarakat modern dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan sejahtera (Siagian, 2001:106). Pembangunan perlu dilakukan sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, jumlah kendaraan yang tidak

seimbang dengan kuantitas ruas jalan yang ada dapat menyebabkan sebuah wilayah gagal melakukan perkembangan. Salah satu pembangunan yang harus dilakukan oleh Kapanjen adalah pembangunan di bidang sistem transportasi khususnya pembangunan jalan raya.

Sejak berpindahnya ibu kota Kabupaten Malang ke Kapanjen dirasakan adanya penumpukan kendaraan khususnya di jalan protokol kapanjen. Dengan adanya penumpukan kendaraan di jalan dapat menghambat laju perekonomian sehingga kapanjen akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembangunan. Jalan keluar untuk mengurangi penumpukan kendaraan yang diambil pemerintah Kabupaten Malang adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang di dalam pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa di dalam pengembangan transportasi jalan raya, Pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah, salah satunya dituliskan Pengembangan jalan pendukung Jalan Lintas Selatan, Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Barat dengan pengembangan jalan sirip dan jalan tembus internal (jalan lingkar dalam kota, jalan tembus), serta jalan tembus eksternal.

Jalan raya mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Jalan raya merupakan penunjang laju ekonomi karena dengan adanya jalan raya maka dapat lebih menjangkau ke daerah daerah terpencil. Ketersediaan jalan raya yang memadai dapat menjadi langkah awal yang mampu merangsang

dan memberi peluang pertumbuhan sosial maupun ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya salah satu wujud nyata pembangunan jalan yang ada di kepanjen adalah pembangunan jalur penghubung atau yang lebih dikenal dengan Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kapanjen.

Jalibar atau Jalur Lingkar Barat, menjadi sebuah jalan yang begitu akrab bagi pengguna jalan di Malang yang ingin pergi ke Blitar. Jalur yang baru diresmikan pada tahun 2013 lalu itu bisa menghemat waktu perjalanan hingga 30 menit dan berhasil mengurai kemacetan di wilayah Kapanjen.

Proyek yang sudah dikerjakan sejak tahun 2008 itu awalnya digerojok dana Rp12,5 milyar, namun membengkak hingga 500 juta lebih banyak dari rencana semula. Tetapi, jalan sejauh lima kilometer itu kini sudah bisa dinikmati oleh semua orang. Ada dua jalur di jalan yang melewati dua desa yaitu desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung itu. Jalan yang besar dan terbilang baru tersebut merupakan sebuah rencana untuk mengembangkan Kapanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang.

Jalibar merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan kabupaten blitar. Jalibar mempunyai lebar total mencapai 26 meter dibagi menjadi dua lajur yang masing-masing lajur memiliki lebar sekitar tujuh meter dan panjang 5,6 km terbentang dari kepanjen hingga kecamatan ngajum yang melewati dua desa yaitu desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung. Salah satu tujuan dibangunnya Jalibar adalah untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di wilayah kepanjen.

Sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang yang sedang melakukan perkembangan, di wilayah kepanjen sering kali mengalami kemacetan khususnya pada jam kerja. Sebagai Jalur Penghubung, Kepanjen sering kali menjadi jalur yang dilewati kendaraan besar seperti Bus maupun Truk, namun jumlah kendaraan dan lebar jalan yang kurang memadai menjadi salah satu penyebab timbulnya kemacetan. Oleh karena itu pemerintah sebagai abdi masyarakat memang perlu memikirkan bagaimana cara agar masalah kemacetan di Kepanjen dapat teratasi. Jalibar dirasa dapat menjadi solusi yang tepat untuk memecah kemacetan karena dapat mengalihkan kendaraan khususnya kendaraan yang akan menuju ke kota blitar agar tidak terjadi penumpukan kendaraan khususnya di daerah Kepanjen.

Dengan dibangunnya jalibar yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Malang, dapat dilihat bahwa ada kemungkinan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dengan dampak positif yang akan ditimbulkan dapat berupa dampak ekonomi maupun dampak sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat diambil judul **“Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Barat Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang?
2. Apa Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Proses Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab dampak Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu kajian studi ilmu administrasi yang membahas tentang pelaksanaan suatu kebijakan.

- b. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Indonesia baik di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat lokal dalam melihat dampak dari perumusan sebuah kebijakan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjelasan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan Ilmu dan kepentingan tertentu. Biasanya pada latar belakang disajikan mengenai keadaan atau fakta aktual yang menarik perhatian penulis untuk diteliti dan mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan-permasalahan, dan kerugian-kerugian yang timbul jika masalah tersebut tidak diteliti. Dalam latar belakang penelitian juga terdapat hal seperti kebijakan dan strategi pembangunan nasional di bidang kesehatan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten. Bagian ini harus dinyatakan dengan jelas topik atau hal apa yang menjadi pokok dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis harus mengutarakan secara sistematis dan mengkaji tentang fakta, hasil penelitian sebelumnya, teori atau konsep pendekatan baru yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori, konsep dan pendekatan yang disampaikan tersebut harus rasional dan diakui kebenarannya yang pada akhirnya nanti akan digunakan untuk menunjang analisis dari data yang telah dikumpulkan. Tinjauan pustaka dipakai dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara singkat jenis penelitian (historis, deskriptif, eksperimental, inferensial), instrumen penelitian dan teknik pengumpulan datanya (tas tulis, lisan atau tindakan, angket, wawancara, observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan (hasil yang berhasil diselesaikan sesuai ruang lingkup batasan masalah) dan saran (terhadap masalah yang belum terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan-perbaikan) tentang kasus TA atau Skripsi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Administrasi Publik

Kajian tentang administrasi publik tidak terlepas dari organisasi pemerintah dalam penanganan masalah-masalah publik. Pemerintah dalam menangani masalah publik didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Maksudnya adalah pemenuhan kebutuhan harus dilakukan secara merata baik terhadap kalangan masyarakat atas maupun golongan bawah bukan untuk kelompok kepentingan semata.

Definisi administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988 : 29) yang dikutip di dalam Keban adalah

“Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam perkembangannya, terdapat juga istilah administrasi publik yang berparadigma demokratis yakni administrasi dari publik, administrasi untuk publik dan administrasi oleh publik” (Keban, 2004:3)

Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengelolaan kebijakan publik seperti penerapan formulasi maupun implementasi tidak dapat terwujud tanpa adanya sumber daya dan personel publik dalam penerapannya. Lanjut lagi, Keban memberikan penjelasan lebih mendalam tentang istilah administrasi yang berparadigma demokratis yakni administrasi dari publik, administrasi untuk publik dan administrasi oleh publik yakni sebagai berikut:

“Istilah administrasi dari publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang selalu aktif dan berinisiatif untuk mengatur atau mengambil langkah

dan prakarsa, yang menurut mereka paling penting bagi masyarakat. Masyarakat diperlukan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah

Sementara itu, administrasi untuk publik dipersepsikan lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu pemerintah berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan terhadap publik (*service provider*). Di sini pemerintah sudah lebih responsive atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mencari cara pemberian pelayan publik untuk publik. Meskipun merupakan kebutuhan publik untuk menolong publik. Namun seringkali pemerintah justru memperdaya publik.

Dan administrasi oleh publik membawa suatu makna yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah pada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus menerus kepada pemerintah” (Keban, 2004: 4-5).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari administrasi publik itu sendiri adalah bagaimana pemerintah dalam suatu negara dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Untuk dapat mencapai pelayanan yang baik dan sistematis maka perlu dilakukan sebuah kebijakan. Kebijakan publik dalam administrasi publik merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) menurut Abdul Wahab menjelaskan bahwa seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Abdul Wahab, 2008:1). Untuk mempermudah dalam memahami istilah dari kebijakan publik, Hogwood and Lewis A. Gunn yang

dikutip oleh Abdul Wahab mengelompokkan beragam penggunaan istilah kebijakan ke dalam sepuluh macam yaitu:

- a *Policy as Label for a Feld of Activity* (Kebijakan sebagai sebuah Label atau Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah).
- b *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan Tertentu yang Dikehendaki).
- c *Policy as Specific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus).
- d *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan Pemerintah).
- e *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan sebagai Bentuk Otorisasi atau Pengesahan Formal).
- f *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai Program).
- g *Policy as Outpute* (Kebijakan sebagai Keluaran).
- h *Policy as Outcame* (Kebijakan sebagai Hasil Akhir).
- i *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai Teori atau Model).
- j *Policy as Process* (Kebijakan sebagai Proses)(Abdul Wahab, 2008:18).

Hal diatas menunjukkan bahwa istilah kebijakan publik itu sangat luas.

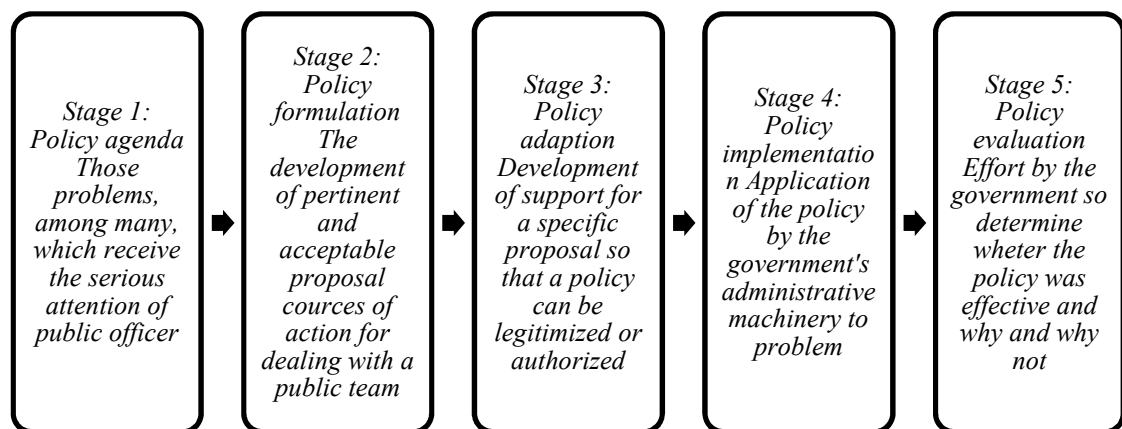
Kebijakan publik menyangkut kebutuhan pemakai kebijakan dalam pemecahan sebuah masalah. Makna tentang kebijakan publik juga dikemukakan oleh Yehezkel Dror yang dikutip oleh Abdul Wahab yang menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan publik itu adalah sebagai berikut:

a verry complex, dinamic process whose various components make different contribution to it. It decides major guidelines for action directed at future, mainly by governmental organs. These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means.(Suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari beberapa unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-bea terhadap pembuatan kebijakan publik tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut dimaksudkan untuk mencapai kepentingan umum dengan cara sebaik mungkin)(Abdul Wahab, 2008:55).

Kebijakan dapat diistilahkan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang sangat kompleks di berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kebijakan diharapkan dapat membawa sebuah perubahan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat aktor-aktor yang terlibat baik itu berasal dari pemerintah maupun dari non pemerintah. Aktor tersebut adalah pembuat kebijakan yang dalam pembuatan kebijakan harus melalui tahapan/proses kebijakan. Inti dari tahapan/proses kebijakan itu meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut dapat dianalisis.

2. Proses Kebijakan

Proses kebijakan publik menurut James E. Anderson, David W. Brady, dan Charles Bullock III dalam Nugroho (2006:56) bahwa proses kebijakan yang normal dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Proses Kebijakan

(Sumber : Anderson, Brady dan Bullock III dalam Nugroho, 2006:56)

Bagan diatas menjelaskan bahwa proses kebijakan berasal dari:

1. Adanya tuntutan kebijakan atas kebutuhan warga yang disalurkan dalam bentuk isu-isu yang bersifat strategis melalui pemerintah menjadi suatu agenda yang ditetapkan bersama. Karena agenda kebijakan dalam perspektif formulasi kebijakan maka dibedakan dari permintaan politik pada umumnya atau dapat juga dibedakan dari “prioritas politik”, dimana biasanya memberikan ranking pada item agenda, dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dengan lainnya.
2. Tahap selanjutnya adalah perumusan masalah. Dalam perumusan masalah dapat memasok pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah. Maksudnya asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.
3. Pada tahap ketiga ini kebijakan yang telah dirumuskan membuahkan suatu rekomendasi yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
4. Pada tahap keempat, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya dan finansial

5. Tahap kelima adalah proses evaluasi. Evaluasi membuahkn pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan engan yang benar-benar dihasilkan serta nilai-nilai apa yang telah diperoleh dari adanya kebijakan tersebut.

Proses kebijakan tidak dapat terlepas dari analisis kebijakan. Dimana proses suatu kebijakan merupakan rangkaian prosedur-prosedur yang dipakai untuk menganalisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan awal dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Maka dari itu, analisis didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) dalam studi kebijakan publik (*public policy study*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Menurut Mustopadijaja yang dikutip oleh widodo (2012:111) evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu. Dalam hal ini jika nilai yang terkandung tersebut masuk dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai menurut Mustopadijaja dalam Widodo berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (*target groups*) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrument kebijakan yang digunakan, respon dari lingkungan, kinerja yang dicapao, dampak yang terjadi, dsb (Widodo, 2012:111).

Adapun Evaluasi menurut Weiss yang dikutip oleh Widodo adalah untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari

serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomen-dasi) dalam membuat keputusan program pada masa mendatang (Widodo, 2012:115). Menurut Widodo untuk melakukan evaluasi kebijakan, Program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan:

- a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
- c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
- d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan tadi, data dicari di lapangan
- e. Hasil data yang diperoleh di lapangan dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan (Widodo, 2012:125). Kriteria / indikator evaluasi menurut Dunn sebagai berikut:

Tabel 1 : Indikator Evaluasi Kebijakan

| Tipe Kriteria | Pertanyaan |
|---------------|--|
| Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? |
| Efisiensi | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? |
| Kecukupan | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah? |
| Pemerataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda? |
| Responsifitas | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu? |

(Sumber: William Dunn 2000:61)

Berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan, kemudian dapat disusun rekomendasi kebijakan berkaitan dengan nasib atau masa depan kebijakan publik yang sedang dievaluasi tadi. Alternatif rekomendasi kebijakan tentang nasib kebijakan menurut Widodo meliputi beberapa hal berikut:

1. Kebijakan program/proyek perlu diteruskan,
2. Kebijakan program/proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan,
3. Kebijakan program/proyek perlu direplikasikan di tempat lain, atau memperluas berlakunya proyek,
4. Kebijakan program/proyek harus dihentikan (Widodo, 2012:126).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mengukur dan menilai keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui dampak maka akan dapat dengan mudah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dengan demikian evaluasi dan dampak saling berkaitan satu sama lain untuk pembuatan keputusan masa mendatang

4. Dampak Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (KBBI, 2001:849). Menurut Winarno arti dari dampak kebijakan adalah sebagai berikut:

Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu dampak yang diinginkan (berkonotasi positif) dan dampak yang tidak diinginkan (berkonotasi negatif). Dampak kebijakan juga dibedakan antara Policy Impact Outcomes dan Policy Output. Policy Out Comes aalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. Sedangkan Policy Output adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan (Winarno, 2007:23).

Dampak itu bersifat merubah atau membentuk sisi lain karena adanya sesuatu yang mempengaruhi. Dampak itu bisa berupa hal positif maupun negatif berdasarkan kuatnya pengaruh yang dibawa oleh penyebabnya. Dampak juga dapat menciptakan kebiasaan dan budaya baru. Pengertian lain tentang dampak kebijakan diungkapkan oleh Dye yang dikutip oih Akib yakni keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi nyata (Akib, 2009:6). Dye dan Anderson yang dikutip oleh Akip menjelaskan dampak kebijakan secara lebih mendalam yakni:

Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan kesejahteraan atau tunjangan profesi, penangkapan terhadap pelaku tindak kriminal, atau penyelenggaraan sekolah umum. Ukuran yang digunakan aalah pengeluaran “perkapita” untuk jalan raya, kesejahteraan, penanganan kriminal per 100.000 penduduk, peristiwa sekolah umum, dan sebagainya (Akib, 2009:6)

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan.

Menurut Dye yang dikutip oleh Akib menyatakan bahwa “dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan

identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah tersebut (Akib, 2009:07)”. Lebih lanjut lagi menurut Parsons yang dikutip oleh Ardyasworo bahwa ada tujuh metode dalam mengetahui dampak kebijakan antara lain:

- a. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- b. Melakukan eksperimen untuk mengkaji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi.
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
- e. Pendekatan kualitatif dan *judgmental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi (Ardyasworo, 2011:43).

Berdasarkan paparan di atas telah dijelaskan bahwa dampak kebijakan merupakan efek atau konsekuensi dari kebijakan yang telah dibuat. Dampak kebijakan yang ditimbulkan tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak yang berupa positif merupakan tanda bahwa kebijakan tersebut berhasil tercapai, dan sebaliknya dampak negatif merupakan dampak yang tidak dikehendaki karena dampak tersebut merupakan sebuah kendala atau penghambat tercapainya goals atau tujuan tersebut.

C. Pembangunan

Dalam pembangunan sangatlah ideal apabila terjadi suatu pertumbuhan yang terarah, adanya perubahan sistem dan ekonomi yang sudah direncanakan sebaik-baiknya. Setiap pembangunan harus mempunyai tujuan. Tujuan itu sendiri harus sudah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian diusahakan agar ada perubahan yang positif, pertumbuhan dan perkembangan menuju ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kemampuan yaitu kemampuan untuk berubah, tumbuh, dan berkembang ke arah tercapainya apa yang dikehendaki dengan adanya pembangunan.

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian pembangunan diartikan sebagai upaya sadar suatu Negara untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan menuju masyarakat modern dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan sejahtera (Siagian, 2001:160). Hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai Negara ketiga yang membutuhkan pembangunan untuk menaikkan status dari Negara berkembang menjadi Negara maju.

Lebih lanjut lagi, Tjokroawinoto yang dikutip oleh Suryono menyimpulkan beberapa definisi pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (Pembanguna menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai.
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *tracendental*, sebagai *metadisciplinax*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideologi of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (Value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara semakin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific* (Suryono, 2004:21).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga. Kemajuan yang bersifat material menjadi hal yang paling utama sebagai wujud realisasi dari pembangunan kerana bentuk dan keberhasilan dalam pembangunan itu dapat terlihat secara kasat mata di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan dilakukan secara terencana yang juga berkaitan dengan perubahan struktur dan nilai sosial di masyarakat.

2. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan diperlukan untuk memahami pembangunan secara lebih mendalam. Konsep pembangunan dapat digambarkan melalui model pertumbuhan, modernisasi, perubahan sosial dan pembaharuan.

a. Model pertumbuhan

Model pertumbuhan yang diungkapkan oleh Rostow merupakan suatu konsep yang memandang pembangunan dari sudut ekonomi dan sosial. Kenaikan pendapatan per-kapita penduduk suatu negara merupakan sebuah realita dan perwujudan pembangunan. Menurut Rostow yang dikutip oleh Budiman beberapa

tahapan proses pembangunan tersebut meliputi masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, tinggal landas, bergerak ke kedewasaan dan konsumsi massa tinggi (Budiman, 1995:26)

1. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional digambarkan sebagai masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan yang masih minim karena sebagian besar masyarakatnya masih memiliki kepercayaan-kepercayaan dari generasi nenek moyang mereka. Hal ini mengakibatkan kelambanan menuju modernitas. Tidak ada investasi karena produksi hanya untuk konsumsi mereka sendiri (Budiman, 1995).

2. Prakondisi Lepas Landas

Pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu melakukan perubahan sendiri. Adanya campur tangan dari masyarakat luar yang lebih maju menyebabkan masyarakat tradisional berusaha bergerak ke arah yang lebih maju walaupun secara lambat. Dan Dalam masa ini masyarakat mulai mengembangkan ide pembaharuan (Budiman, 1995).

3. Kondisi Lepas Landas

Pembangunan pada periode ini sudah berjalan lancar tanpa hambatan. Perubahan pada periode ini ditandai dengan mulai adanya tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional atau lebih. Industri dan produktivitas pertanian dengan mengandalkan teknologi baru mulai berkembang dengan pesat (Budiman, 1995).

4. Bergerak ke Arah Kedewasaan

Pada periode ini investasi antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali yang diharapkan dapat mengatasi pertumbuhan penduduk. Industri berkembang pesat dan masyarakat telah mampu membuat barang-barang yang dulunya masih diimpor. Mereka tidak hanya memproduksi barang konsumsi tetapi juga barang modal (Budiman, 1995).

5. Konsumsi Massa Tinggi

Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pada titik ini pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan menopang kemajuan secara terus menerus (Budiman, 1995).

Dalam mencapai tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka diperlukan adanya pendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menurut Todaro yang dikutip oleh Suryono dan Nugroho yaitu:

1. Akumulasi modal, termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia
2. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas
3. Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional (Suryono dan Nugroho, 2007:3).

b. Model Modernisasi

Model modernisasi merupakan bentuk perubahan teknik industri dari cara tradisional ke modern yang berasal dari penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan. Modernitas diukur dari sejauh mana bangsa tersebut menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab pada semua aspek dalam masyarakat.

c. Model perubahan sosial

Model perubahan sosial diartikan sebagai perubahan lembaga-lembaga masyarakat yakni perubahan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk sikap dan pola perilaku kelompok. Faktor biologis yang berhubungan dengan seluruh kegiatan manusia, faktor teknologis berhubungan dengan kemampuan dan kelengkapan teknologi maupun informasi dalam menunjang kegiatan manusia dan faktor ideologis berhubungan dengan gagasan dan pola pikir manusia dapat mendorong adanya perubahan sosial. Hal ini seperti yang diungkapkan Soemardjan yang dikutip oleh Suryono dan Nugroho menjelaskan bahwa “faktor pendorong perubahan sosial itu meliputi faktor teknologis dan faktor ideologis (Suryono dan Nugroho, 2007:6)”.

d. Model Pembaharuan

Model pembaharuan merupakan salah satu bentuk proses sosial yang sangat berkaitan erat dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pembaharuan dan modernisasi didorong oleh penemuan yang ilmiah (*innovations*), sedangkan terhadap perubahan sosial, pembaharuan mempunyai pengaruh timbal balik (Suryono dan Nugroho, 2006:8).

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pembangunan terdapat model pertumbuhan yang memandang dari segi ekonomi dan perubahan sosial. Hal ini sangat relevan dalam mengkaji fenomena tentang dampak sosial ekonomi masyarakat dalam mengkaji fenomena tentang dampak sosial ekonomi masyarakat dalam kebijakan pembangunan jalan lingkar barat yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan kabupaten blitar. Terhubungnya kedua kabupaten ini tentu dapat membawa pengaruh baik dari segi integrasi sosial sampai berpengaruh pada kegiatan perekonomian.

3. Infrastruktur Transportasi

Dalam menunjang terwujudnya pembangunan diperlukan adanya kelengkapan fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur adalah salah satu sarana dan prasarana publik yang dapat menunjang kelancaran kegiatan dalam masyarakat baik itu kegiatan sosial maupun ekonomi. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu Negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi.

a. Pengertian Infrastruktur

Menurut Grigg yang dikutip oleh Kodatie menyatakan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, darinase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi (Kodoatie, 2003:9). Infrastruktur merupakan suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengait dan ketergantungan satu sama

lainnya. Bangunan fisik itu meliputi jaringan jalan yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat Pemerintahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur diperlukan koordinasi mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

b. Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Definisi jalan menurut Pasal 1 angka 4 UU No.38 Tahun 2004 tentang

Jalan yaitu:

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. hal ini karena infrastruktur jalan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk menciptakan lapangan kerja untuk menampung penambahan angkatan kerja. Sistem transportasi yang baik merupakan pilar utama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat optimal.

Aktivitas ekonomi individu tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan sistem transportasi yang baik. Salah satu hal yang dapat berimbas kepada pertumbuhan apabila tidak didukung dengan sistem transportasi yang baik adalah biaya transportasi. Apabila sistem transportasi baik maka biaya transportasi akan rendah dan dapat memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pendistribusian barang maupun jasa dengan harga murah dan akses yang lebih baik.

D. Teori dampak sosial pembangunan

Kodoatie (2005 : 269) “Pengantar pedesaan Infrastruktur”

- a. Membuka akses bagi perumahan pedesaan terhadap pusat kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan jalan baru biasanya menghubungkan antara perumahan dengan berbagai fasilitas publik seperti perkantoran, pendidikan, maupun kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan baru tersebut semakin mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas publik tersebut baik pendidikan maupun kesehatan. Kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan maupun kesehatan tersebut akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan masyarakat.

- b. Meningkatkan ikatan sosial dan integrasi nasional. Pembangunan jalan ditujukan untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. dengan demikian akan membuka daerah daerah yang terisolir. Selain itu, dengan adanya jalan yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain akan semakin mempermudah pergerakan masyarakat suatu daerah menuju ke daerah lain di sekitarnya. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan baru tersebut akan semakin meningkatkan pergerakan/ mobilisasi masyarakat suatu daerah. Dengan adanya peningkatan mobilisasi tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat interaksi masyarakat. Masyarakat suatu daerah tertentu akan lebih sering melakukan interaksi dengan masyarakat lain di sekitarnya. Dengan demikian akan menimbulkan ikatan sosial antar masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan integritas sosial

E. Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Perubahan Sosial

Konsep mengenai perubahan sosial sangatlah beragam. Hal ini bergantung pada sudut pandang dari peneliti tersebut. Perubahan sosial selalu berkaitan dengan perubahan budaya, yang pada dasarnya kedua konsep tersebut berbeda.

Definisi perubahan sosial menurut Ranjabar yaitu:

Perubahan sosial adalah perubahan dalam bentuk struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, kekuatan, dan persebaran penduduk. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan yang antara lain mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan

sebagai pegangan dalam kehidupan atau kesenian, bahasa dan lain-lain dari pemikiran serta karya maupun hasil karya manusia (ranjabar, 2008:1)

Peubahan sosial tidak terlepas dari adanya beberapa faktor-faktor, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Menurut ranjabar terdapat beberapa faktor yang mampu menimbulkan perubahan sosial di masyarakat, yaitu:

- a. Penemuan-penemuan baru.
- b. Struktur Sosial (Perbedaan posisi dan fungsi dalam masyarakat).
- c. Inovasi
- d. Perubahan lingkungan hidup
- e. Ukuran penduduk dan komposisi penduduk
- f. Inovasi dalam Teknologi

2. Pertumbuhan Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Salah satu kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Ilmu ekonomi regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Tujuan ilmu ekonomi regional sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Menurut Ferguson yang dikutip oleh tarigan mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah:

- a. *Full employment*, mengatasi tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan utama bagi pemerintah. Pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus memeberikan harga diri/status.

- b. *Economic growth* (Pertumbuhan Ekonomi), penyediaan lapangan kerja diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.
- c. *Price stability* (Stabilitas harga), fluktuasi harga biasanya membuat masyarakat mengalami kekhawatiran dengan harta, kerja keras yang telah diupayakan berkurang di kemudian hari (Tarigan, 2009:5).

Pertumbuhan ekonomi menurut Buediono yang dikutip oleh Tarigan adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Tarigan, 2009:46). Jadi, Presentasi pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Keberadaan jalan akan menimbulkan pergerakan atau mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Daerah di sekitar jalan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dikarenakan adanya mobilitas yang selalu terjadi. Dengan dibangunnya jalan baru maka akan muncul atau tumbuh lapangan kerja yang baru. Disebutkan di atas bahwa presentase *output* harus lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa dengan berpindahnya ibu kota Kabupaten Malang ke Kepanjen mengakibatkan naiknya presentase pertambahan jumlah penduduk. Apabila tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur maka pertumbuhan ekonomi tidaklah dapat terjadi. Dengan dibangunnya Jalibab Kepanjen Kabupaten Malang maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

F. Teori Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan

1. Dampak Sosial

Kodoatie (2005 : 269) “pengantar pedesaan infrastruktur”

1. Membuka akses bagi perumahan pedesaan terhadap pusat kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan jalan baru biasanya menghubungkan antara perumahan dengan berbagai fasilitas publik seperti perkantoran, pendidikan, maupun kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan baru tersebut semakin mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas publik tersebut baik pendidikan maupun kesehatan. Kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan maupun kesehatan tersebut akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan ikatan sosial dan integrasi nasional. Pembangunan jalan ditujukan untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dengan demikian akan membuka daerah-daerah yang terisolir. Selain itu, dengan adanya jalan yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain akan semakin mempermudah pergerakan masyarakat suatu daerah menuju ke daerah lain di sekitarnya. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan baru tersebut akan semakin meningkatkan pergerakan/mobilisasi masyarakat suatu daerah. Dengan adanya peningkatan mobilisasi tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat interaksi

masyarakat. Masyarakat suatu daerah tertentu akan lebih sering melakukan interaksi dengan masyarakat lain di sekitarnya. Dengan demikian akan menimbulkan ikatan sosial antar masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan integritas sosial

2. Dampak Ekonomi

1. Membuka kesempatan kerja pada tahap pelaksanaan konstruksi khususnya yang menggunakan sistem padat karya.
2. Meningkatkan pasokan barang barang konsumsi dengan harga yang lebih murah. Pembangunan jalan baru akan mempermudah dan memperlancar pendistribusian barang barang konsumsi kemudahan dan kelancaran pendistribusian barang barang konsumsi tersebut secara tidak langsung akan menekan biaya distribusi dan meningkatkan pasokan barang-barang konsumsi dengan biaya distribusi yang dapat ditekan dan peningkatan pasokan tersebut mengakibatkan harga barang konsumsi lebih murah.
3. pembangunan pertanian dengan hasil yang lebih tinggi perubahan guna lahan peningkatan penggunaan kebutuhan pertanian yang lebih modern dan peningkatan produksi untuk dipasarkan di bidang pertanian. Pembangunan jalan baru akan menimbulkan perubahan terhadap penggunaan lahan. Pembangunan jalan baru tidak jarang akan mengurangi luas lahan pertanian pembangunan. Jalan baru juga akan mendorong pembangunan fasilitas umum seperti perkantoran, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Selain itu dengan adanya pembangunan jalan baru akan mendorong masyarakat luar untuk masuk ke daerah tersebut dan melakukan aktivitas ekonomi. Dengan

masuknya masyarakat dari luar akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan fasilitas perumahan dengan demikian akan terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan, maupun perkantoran, tempat ibadah, maupun sekolahan. Selain itu pembangunan jalan baru akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap lahan pertanian dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengangkutan hasil pertanian kemudahan tersebut akan mendorong pembangunan di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil pertanian.

G. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial ekonomi

Faktor penyebab utama perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam masyarakat (sistem sosial), sedangkan faktor eksternal datangnya dari luar masyarakat (sistem sosial) yang bersangkutan.

1. Faktor Internal

a. Inovasi

Prosesnya dimulai dengan adanya temuan-temuan baru dibidang ilmu pengetahuan. Temuan baru ini lazim di sebut *discovery* yang lebih dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar, dan bukan dimaksudkan untuk pemecahan masalah di masyarakat. Dari temuan baru ini kemudian berkaembang menjadi *invention* yang dikaitkan dengan penecahan masalah. Di bidang pertanian misalnya, *invention* ini berupa percobaan-percobaan teknologi baru baik di tingkat nasional maupun lokal (disesuaikan dengan kondisi lokal setempat)

.Suatu *invention* akan merupakan inovasi (*innovation*) bilamana dalam peberapannya di masyarakat pengguna (*user*) memberikan dampak pembaharuan, yakni terjadi perubahan-perubahan di kondisi sebelumnya.

Di masyarakat pedesaan, inovasi yang muncul di masyarakat (bersifat internal) umumnya jarang terjadi. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, permodalan dan sarana lain yang menunjang munculnya temuan baru. Dewasa ini, dengan makin majunya sarana komunikasi, seperti televisi, pengaruh inovasi cukup besar dan relatif cepat terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

Proses penerimaan suatu inovasi oleh masyarakat lazimnya melalui proses difusi dan adopsi. Proses difusi ini merupakan proses penyebaran inovasi dalam suatu sistem sosial atau masyarakat. paling tidak terdapat lima unsur (komponen) dalam difusi inovasi, yakni : aktor pembaharu (dikenal dengan istilah *change agent*), inovasi, komunikasi, sistem sosial dan waktu. Cepat atau lambatnya (unsur waktu) proses difusi dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik keempat unsur lainnya.

Sedangkan adopsi merupakan suatu proses penerimaan atau peberapan suatu inovasi oleh anggota sistem sosial. Prosesnya melalui tahapan-tahapan tertentu, antara lain dapat dibedakan antara proses adopsi lima tahap (menurut Lionberger) dan empat tahap (menurut Rogers dan Shoemaker). Adopsi lima tahap dimulai dari tahap kesadaran (*awareness*), minat (*interest*), menilai (*evaluation*), mencoba (*trial*) dan menerapkan (*adoption*). Sedangkan adopsi empat tahap meliputi: tahap pengenalan, persuasi, keputusan dan konfirmasi. Pada tahap

pengenalan, individu mulai mengetahui dan menaruh minat terhadap inovasi, yang selanjutnya diikuti dengan tahap persuasi di mana individu mulai mengambil sikap untuk membuat keputusan. Pada tahap keputusan, bisa terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi. Terakhir adalah tahap konfirmasi yaitu tahap di mana individu mencari informasi untuk memperkuat keputusan yang telah diambil

b. **Penduduk**

Pengaruh langsung dari penduduk terhadap perubahan sosial terutama terkait dengan perubahan jumlah penduduk dan strukturnya (misalnya menurut golongan umur). Perubahan jumlah penduduk akan berpengaruh dengan segala segi kehidupan masyarakat, misalnya pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dilihat dari struktur umur, besarnya jumlah usia penduduk usia sekolah (6-18 tahun) akan terkait dengan kebutuhan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Demikian juga dengan banyaknya, jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja (umur 15-64 tahun) terkait dengan kebutuhan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu data kependudukan seringkali dimanfaatkan untuk dasar perencanaan bidang-bidang lain, misalnya bidang pertanian, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, industri dan lain-lain. Dari sisi lain, makin banyaknya jumlah penduduk akan berdampak munculnya berbagai institusi dan pranata yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Pada prinsipnya, perubahan jumlah penduduk disuatu daerah di pengaruhi oleh empat unsur, yaitu kelahiran (*Birth*), kematian (*Death*), migrasi masuk (*in*

migration) dan migrasi keluar (*Out migration*). Kelahiran dan migrasi masuk akan menambah, sebaliknya kematian dan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. Perubahan sosial yang cukup signifikan dan berlangsung relatif cepat dapat terjadi dengan banyaknya arus migrasi masuk (penduduk pendatang) ke suatu wilayah yang jarang penduduknya. Misalnya cukup banyak penduduk pulau Jawa yang melakukan transmigrasi, baik transmigrasi umum (dikelola oleh pemerintah) maupun spontan atau swadaya ke wilayah-wilayah di luar pulau Jawa yang masih jarang penduduknya. Wilayah-wilayah di pulau Jawa akan berkembang cepat, terlebih lagi bilamana wilayah tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Di wilayah ini akan terjadi kontak budaya antara budaya Jawa dengan budaya lokal yang akan semakin mendorong proses perubahan sosial di masyarakat.

c. **gerakan sosial**

Sebagai salah satu penyebab perubahan sosial gerakan sosial merupakan suatu upaya kolektif untuk menciptakan suatu tatanan yang baru. faktor-faktor yang mendorong timbulnya gerakan sosial antara lain:

- terjadinya kegagalan dari suatu instansi institusi atau organisasi sosial.
- ketidakpuasan individu
- timbulnya keresahan sosial di kalangan masyarakat.
- adanya peluang untuk membentuk suatu institusi baru atau suatu tatanan baru yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

d. konflik sosial

Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat bisa juga konflik terjadi antar generasi yaitu antara generasi tua dan muda generasi tua umumnya bersifat konservatif atau kolot tradisional tidak suka kepada perubahan sebaliknya kepentingan generasi muda ingin selalu ada perubahan mereka mudah menerima unsur-unsur budaya asing yang berbeda dan cenderung tarafnya lebih tinggi dibandingkan budaya lokal.

2. faktor eksternal

a. Inovasi

Selain bersifat internal inovasi juga bersifat sebagai faktor penyebab eksternal di negara-negara berkembang pada umumnya inovasi ini cenderung lebih banyak bersifat eksternal misalnya melalui transfer teknologi modern dari negara-negara maju demikian pula untuk daerah pedesaan di Indonesia inovasi ini lebih bersifat eksternal daripada internal karena sebagian besar berasal dari daerah perkotaan

b. peperangan

Peperangan dengan negara lain juga akan berdampak perubahan sosial dan kebudayaan terutama di negara yang kalah. Hal ini kiranya dapat dipahami karena negara yang menang dapat memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah perang. Misalnya dapat dibuktikan di negara-negara yang kalah perang dalam perang dunia

c. Perubahan lingkungan

Terutama merupakan lingkungan fisik karena terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gelombang tsunami dan lain-lain seringkali bencana alam seperti banjir disebabkan karena ulah manusia atau masyarakat sendiri. Penebangan hutan yang tidak mengindahkan kaidah kaidah pelestarian lingkungan membuang pembuangan sampah yang tidak terkendali adalah contoh-contoh ulah manusia penyebab bencana banjir.

H. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural oleh Robert. K. Merton. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian masyarakat akan membawa perubahan juga terhadap bagian yang lain. Semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional terhadap masyarakat. Robert . K . Merton mengemukakan bahwa :

1. Fungsi adalah akibat – akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem.
2. Disfungsi adalah akibat – akibat negatif yang muncul dalam penyesuaian suatu sistem.

3. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan.
4. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan.

Suatu pranata tertentu dapat fungsional bagi suatu unit tertentu dan sebaliknya disfungsional terhadap unit sosial yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2005:5). Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, pengamatan secara langsung dan pemanfaatan dokumen. Data yang diperoleh berupa data kualitatif, data kualitatif ini tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi berupa informasi-informasi yang jelas dan nyata.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui penekatan deskriptif sangat tepat untuk memahami masalah dampak sosial ekonomi kebijakan pembangunan jalan lingkar barat kepanjen. Dalam pembahasannya akan disajikan dengan memberikan deskripsi secara detail dan menyeluruh sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang.
 - a Dampak Sosial
 - (1) Pendidikan
 - (2) Kesehatan
 - (3) Mempermudah akses jalan
 - (4) Perubahan Perilaku Masyarakat
 - b Dampak Ekonomi
 - (1) Meningkatnya sentra perdagangan
 - (2) Meningkatnya harga tanah
 - (3) Perubahan mata pencaharian masyarakat
 - (4) Tingginya tingkat polusi dan kebisingan
2. Faktor yang menyebabkan Perubahan Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang
 - a. Bertambah dan Berkurangnya penduduk
 - b. Konflik dalam masyarakat
 - c. Tingginya mobilitas sosial

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti menentukan dengan tepat dimana letak lokasi dan situs penelitian tersebut dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mencari data secara fokus. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Dinas Cipta Karya dan Ketenaga Kerjaan, Jl. Panji No. 158 Kepanjen Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian adalah letak titik peneliti untuk menemukan data yang valid dan akurat untuk dijadikan referensi atau bahan dalam melakukan penelitian. . Situs penelitian dari penelitian ini yaitu ruang lingkup kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dan desa ngadilangkung yang dilalui oleh JALIBAR.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua

(a) Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati maupun diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film (Moleong, 2002;112). Selain itu yang dimaksud dengan data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus. Data primer dalam hal ini diperoleh dari informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2010;132). Oleh karena itu seorang

informan harus benar-benar tahu atau sebagai pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. identifikasi dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti? 2) Data sekunder seperti apa yang kita butuhkan? Identifikasi data sekunder yang kita butuhkan akan membantu mempercepat dalam pencarian dan penghematan waktu serta biaya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Instrumen penelitian merupakan pedoman peneliti yang dapat memudahkan peneliti mendapatkan dan menyimpan data yang telah diamati. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen atau alat penelitian utama. Peneliti adalah yang mengadakan observasi atau mencari data dalam penelitian ini. Peneliti melakukan sendiri penelitiannya saat mencari data yang akan diamati.

2. Pedoman Wawancara

Untuk memperoleh data yang relevan, dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pada saat wawancara tidak terjadi kerancuan yang dapat menghambat pengambilan data.

3. Peralatan Teknis

Peralatan teknis yang digunakan peneliti berupa perlengkapan alat tulis seperti bolpoin, penghapus, penggaris, note book. Selain itu peneliti juga menggunakan kamera maupun alat perekam suara untuk memudahkan pada saat observasi di lapangan.

4. Catatan Lapangan

Catatan lapangan ialah catatan yang berisi poin-poin penting dari informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun observasi penelitian di lapangan

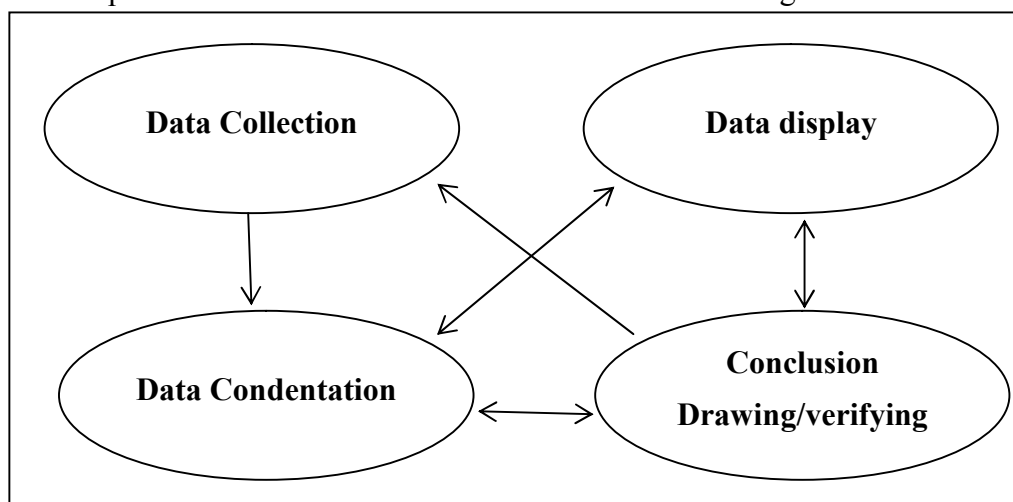
F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy

Moleong, 2002:103). Analisis data juga bis dilihat dari beberapa perspektif, secara mekanis maka dalm analisa dilakukan:

- a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data menjadi informasi yang mudah dipahami
- b. Interpretasi atas berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas atau inferensi ke populasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33). Model ini menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga menghasilkan data jenuh. Komponen dari model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Model Analisis Data Interaktif

(Milles, Huberman dan Saldana 2014:31-33)

Gambar di atas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan.

Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Adapun langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kondensasi data

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi dapat dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dilokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh dilapangan.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data ini peneliti akan mengetahui gambaran objek atau fokus penelitian secara keseluruhan sesuai dengan topik penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Data yang diperoleh disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh data yang sebenarnya. Kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka pikir peneliti maupun berdasarkan catatan-catatan yang ada agar mempunyai validitas dan tercapai konsensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber informasi.

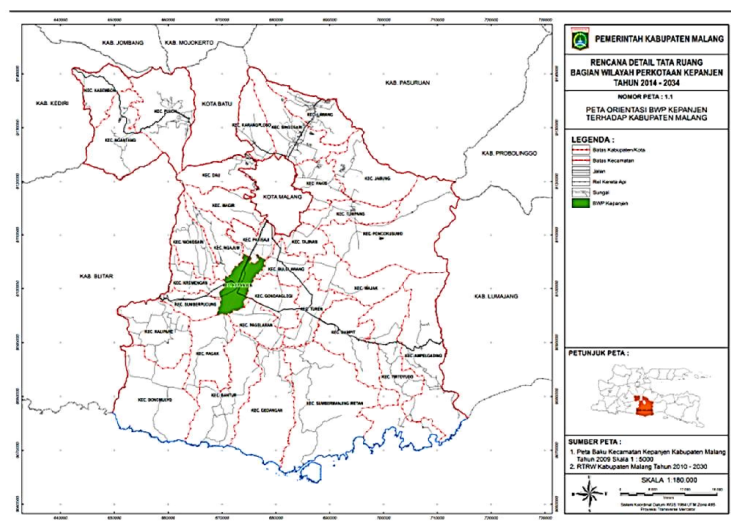
Data yang diperoleh sejak awal senantiasa harus dibuat kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, tetapi dengan bertambahnya data informasi, melalui proses verifikasi secara terus menerus maka diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded*". Dalam hal ini analisis kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang



Gambar 3 : Peta Wilayah Kabupaten Malang
(RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030)

a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada $112^{\circ} 17' 10,90''$ sampai dengan $112^{\circ} 57' 00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ sampai dengan $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang Selatan. Batas administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 3347,87 km². dikelilingi oleh gunung /pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Bromo, Semeru dan Tengger.

Kondisi iklim Kabupaten Malang menunjukkan nilai kelembaban tertinggi adalah 90.74 % yang jatuh pada bulan Desember, sedangkan nilai kelembaban terendah jatuh pada bulan Mei, rata-rata berkisar pada 87.47 %. Suhu rata-rata 26.1 – 28.3 °C dengan suhu maksimal 32.29 °C dan minimum 24.22 °C. Rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km/jam. Kecepatan angin terendah yakni berkisar pada 0.55 km/jam umumnya jatuh pada bulan Nopember dan tertinggi yakni 2.16 km/jam jatuh pada bulan September. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.800 – 3.000 mm per tahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54 – 117 hari/tahun.

Topografi kabupaten Malang terdiri dari: Kelerengan 0-2% yang meliputi kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji. Kelerengan 2-15% yang meliputi kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, bampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Kelerengan 15-40% yang meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari). Dan kelerengan 40% meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

b. Kondisi Demografis Kabupaten Malang

Tabel 2. Tabel Jumlah Penduduk di Kabupaten Malang

| Kecamatan | Luas wilayah | | Penduduk | | Kepadatan Penduduk (orang/km ²) |
|--------------------|-----------------|------|----------|------|---|
| | km ² | % | Jumlah | % | |
| 010. Donomulyo | 192,60 | 6,47 | 62 548 | 2,46 | 325 |
| 020. Kalipare | 105,39 | 3,54 | 60 504 | 2,38 | 574 |
| 030. Pagak | 90,08 | 3,03 | 45 757 | 1,80 | 508 |
| 040. Bantur | 159,15 | 5,35 | 68 816 | 2,70 | 432 |
| 050. Gedangan | 130,55 | 4,39 | 52 938 | 2,08 | 405 |
| 060. Sumbermanjing | 239,49 | 8,04 | 90 350 | 3,55 | 377 |
| 070. Dampit | 135,31 | 4,55 | 119 012 | 4,68 | 880 |
| 080. Tirtoyudo | 141,96 | 4,77 | 60 737 | 2,39 | 428 |
| 090. Ampelgading | 79,60 | 2,67 | 52 622 | 2,07 | 661 |
| 100. Poncokusumo | 102,99 | 3,46 | 92 737 | 3,64 | 900 |
| 110. Wajak | 94,56 | 3,18 | 80 825 | 3,18 | 855 |
| 120. Turen | 63,90 | 2,15 | 114 108 | 4,48 | 1 786 |
| 130. Bululawang | 49,36 | 1,66 | 71 147 | 2,80 | 1 441 |
| 140. Gondanglegi | 79,74 | 2,68 | 84 577 | 3,32 | 1 061 |
| 150. Pagelaran | 45,83 | 1,54 | 67 175 | 2,64 | 1 466 |
| 160. Kepanjen | 46,25 | 1,55 | 106 668 | 4,19 | 2 306 |
| 170. Sumberpucung | 35,90 | 1,21 | 53 642 | 2,11 | 1 494 |
| 180. Kromengan | 38,63 | 1,30 | 38 222 | 1,50 | 989 |

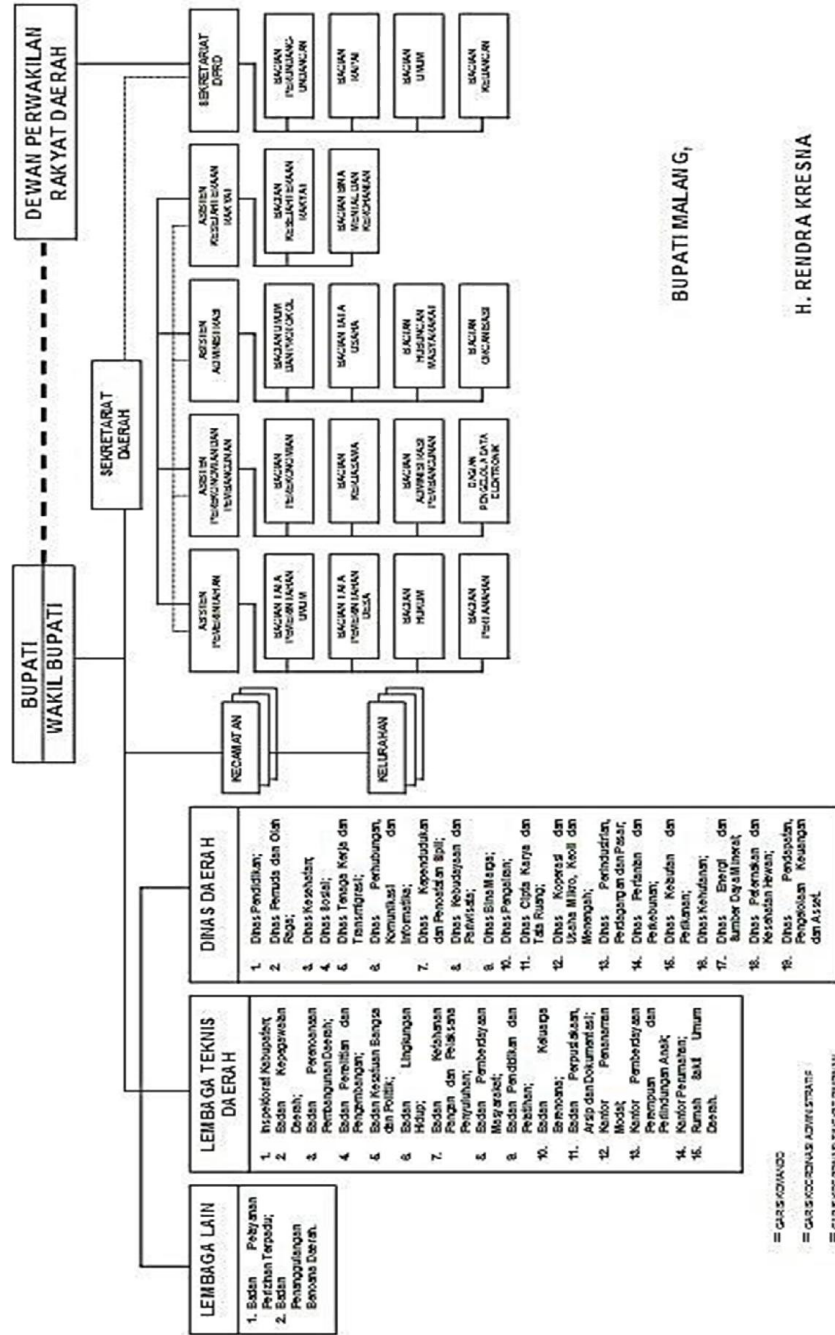
| Kecamatan | Luas Wilayah | | Penduduk | | Kepadatan Penduduk (orang/km ²) |
|------------------|-----------------|--------|-----------|--------|---|
| | km ² | % | Jumlah | % | |
| 190. Ngajum | 60,12 | 2,02 | 49 094 | 1,93 | 817 |
| 200. Wonosari | 48,53 | 1,63 | 41 292 | 1,62 | 851 |
| 210. Wagir | 75,43 | 2,53 | 86 878 | 3,41 | 1 152 |
| 220. Pakisaji | 38,41 | 1,29 | 88 030 | 3,46 | 2 292 |
| 230. Tajinan | 40,11 | 1,35 | 53 743 | 2,11 | 1 340 |
| 240. Tumpang | 72,09 | 2,42 | 75 440 | 2,97 | 1 046 |
| 250. Pakis | 53,62 | 1,80 | 153 622 | 6,04 | 2 865 |
| 260. Jabung | 135,89 | 4,56 | 73 850 | 2,90 | 543 |
| 270. Lawang | 68,23 | 2,29 | 109 645 | 4,31 | 1 607 |
| 280. Singosari | 118,51 | 3,98 | 178 534 | 7,02 | 1 506 |
| 290. Karangploso | 58,74 | 1,97 | 81 986 | 3,22 | 1 396 |
| 300. Dau | 41,96 | 1,41 | 74 953 | 2,95 | 1 786 |
| 310. Pujon | 130,75 | 4,39 | 67 502 | 2,65 | 516 |
| 320. Ngantang | 147,70 | 4,96 | 56 346 | 2,21 | 381 |
| 330. Kasembon | 55,67 | 1,87 | 31 015 | 1,22 | 557 |
| Kabupaten Malang | 2 977,05 | 100,00 | 2 544 315 | 100,00 | 855 |

Sumber: BPS Kabupaten Malang (Proyeksi Sensus Penduduk)

c. Struktur Organisasi Kabupaten Malang

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 7 Tahun : 2012
 TANGGAL : 14 Agustus 2012

BAGAN SUWAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

□ GRS/GRAND
 □ GRS/GRAND ADMINISTRASI
 □ GRS/GRAND TUGAS TUNJANG

d. **Visi dan Misi Kabupaten Malang**

1) **Visi Kabupaten Malang**

Visi Kabupaten Malang adalah : "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2) **Misi Kabupaten Malang**

Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

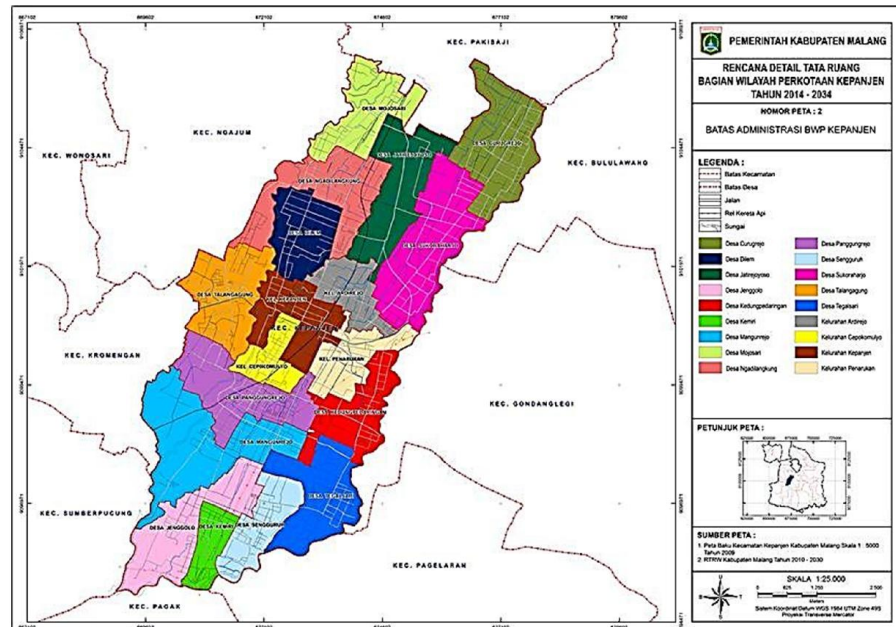
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu :

1. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
2. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.

2. Gambaran Umum Kecamatan Kapanjen



Gambar 4 : Peta Wilayah Kecamatan Kapanjen

Sumber: Dinas Cipta Karya (2017)

Kecamatan Kapanjen merupakan kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Kecamatan ini terdiri dari empat kelurahan, 14 desa, 39 dusun, 77 RW, dan 467 RT. Kapanjen merupakan ibukota Kabupaten Malang sejak ditetapkan pada tahun 2008.

Keempat kelurahan dan 14 desa di kecamatan ini adalah Kelurahan Ardirejo, Kelurahan Cempokomulyo, Kelurahan Kapanjen, Kelurahan Pendarukan, Desa Curungrejo, Desa Dilem, Desa Jatirejoyoso, Desa Jenggolo, Desa Kedung Pedaringan, Desa Kemiri, Desa Mangunrejo, Desa Mojosari, Desa Ngadilangkung, Desa Panggungrejo, Desa Sengguruh, Desa Sukoharjo, Desa Tegalsari, dan Desa Tulangagung.

Secara administratif, Kecamatan Kapanjen dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Kapanjen

berbatasan langsung dengan Kecamatan Pakisaji. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Gondanglegi dan Bululawang. Di sebelah selatan, Kecamatan Kepanjen berbatasan dengan Pagak. Lalu, di sebelah barat, Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kromengan dan Ngajum.

Kecamatan Kepanjen memiliki luas wilayah 44.68 km². Sementara itu, jumlah penduduk mencapai 101.229 jiwa. Secara geografis, Kepanjen terletak pada ketinggian rata-rata 350 meter di atas permukaan laut. Lokasinya diapit oleh tiga gunung besar, yaitu Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan pegunungan Malang selatan.

Letak Kepanjen berada 20 km di sebelah selatan Kota Malang, dan dilintasi oleh jalur utama transportasi Surabaya-Malang-Blitar. Kecamatan ini juga dihubungkan dengan Kota Malang lewat jalur kereta api yang menghubungkan Lawang-Malang-Kepanjen. Jalur rel ini juga menghubungkan Kepanjen dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Malang, Blitar, Jakarta, dan kota lainnya. Hal itu didukung dengan adanya Stasiun Kepanjen dan Terminal Kepanjen.

3. Gambaran Umum Desa Ngadilangkung

a. Sejarah Desa Ngadilangkung

Setiap desa mempunyai sejarah, khususnya tokoh –tokoh yang pertama kali membedah desa atau membuat babat hutan sehingga menjadi pemukiman seperti saat ini. Memang sulit menggali sejarah para tokoh yang merupakan cikal bakal Desa Ngadilangkung. Di bidang pemerintahan, sebelum di bentuk

pemerintahan desa seperti saat ini, terdapat kepala Pemerintahan yang disebut Aris. Aris (Kearisan) membawahi empat wilayah desa yaitu Desa Ardirejo, Desa Dilem, Desa Ngadilangkung dan Desa Mojosari. Di masing – masing desa ini oleh para sesepuh dulu disiapkan makam desa, agar generasi berikutnya nanti tidak terlalu jauh jika memakamkan jenazah para warganya yang meninggal dunia.

Desa Ngadilangkung mempunyai pemerintahan sendiri semenjak berhasil memenangkan sayembara, yaitu barang siapa yang dapat menemukan pohon sambi di samping sebuah punden, maka wilayahnya akan diberi kebebasan untuk memiliki pemerintahan yang terlepas dari Aris. Seorang warga desa Ngadilangkung berhasil menemukan pohon samba itu yang terletak di samping sebuah punden di lokasi makam sebelah barat. Sedangkan pohon samba itu sendiri berasal dari desa Dawung yang sengaja ditanam seseorang di dekat punden. Jadilah Desa Ngadilangkung mempunyai pemerintahan sendiri sampai sekarang ini.

b. Kondisi Geografis Desa Ngadilangkung

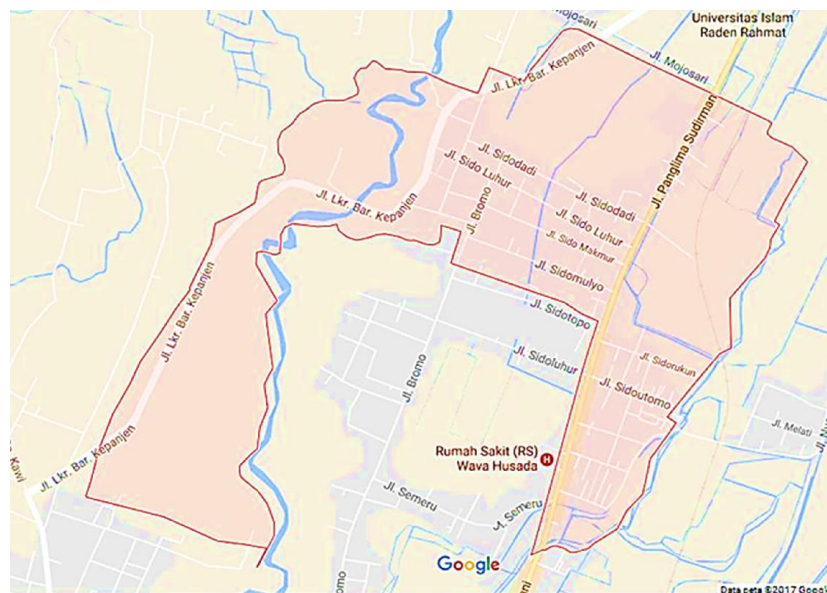
Secara geografis Desa Ngadilangkung memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 278,17 Ha yang terbagi menjadi 2 Dusun, yakni: Dusun Ngadilangkung dan Dusun Ketawang dengan perbatasan wilayah sebagai berikut

Utara : Desa Mojosari, Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen

Barat : Desa Banjarsari, Desa Ngasem Kecamatan Ngajum

Selatan : Desa Dilem, Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen

Timur : Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen



Gambar 5: Peta Wilayah Desa Ngadilangkung
Sumber : Google Earth (2017)

Desa Ngadilangkung memiliki luas wilayah seluruhnya 275,87 Ha.

Dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Luas Sawah | : | 132,10 Ha |
| Luas Perkebunan | : | 0,00 Ha |
| Luas Tanah Pemukiman | : | 115,37 Ha |
| Luas Tanah Perkantoran | : | 0,15 Ha |
| Luas Taman | : | 1,0 Ha |
| Luas Tanah Makam | : | 2,0 Ha |
| Luas pekarangan | : | 9,50 Ha |
| Luas Prasarana Umum Lainnya | : | 15,75 Ha |

c. Kondisi Demografis Desa Ngadilangkung

Wilayah Desa Ngadilangkung terbagi dari 2 Dukuh, 3 wilayah RW dan 15 wilayah RT. Dengan rincian sebagai berikut :

Dusun : Dusun Ketawang terdiri dari 1 RW yaitu :

RW II : terdiri dari 5 RT

Dusun Ngadilangkung yang terdiri dari 2 RW :

RW I : terdiri dari 4 RT

RW III : terdiri dari 6 RT

Jumlah Penduduk:

Jumlah laki-laki : 3968 Orang

Jumlah perempuan : 3948 Orang

Jumlah total : 7917 Orang

Jumlah kepala keluarga : 2228 KK

Kepadatan penduduk : 2.846,20 per KM

4. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Malang

a. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

- a Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- d Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g Pembinaan UPT;
- h Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah;
- i Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah.

b. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Malang

1) Visi BAPPEDA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka visi yang dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : **“Menjadi Lembaga Perencana yang Kapabel dan Profesional Dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah”** yaitu mampu secara profesional memfasilitasi dan mengakomodir berbagai kebijakan, sehingga antar program dan kegiatan pembangunan dari para *stakeholders*, saling memperkuat, selaras, sinkron, dan memberikan landasan yang mantap bagi pembangunan selanjutnya,

serta mempunyai peran sebagai arah/pedoman, pendorong, penggerak utama, inisiator dan inovator pelaksanaan pembangunan yang efektif, menuju visi Kabupaten Malang.

2) Misi BAPPEDA

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memiliki misi yakni : **"Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Sinergis, Partisipatif, dan Akuntabel"**

3) Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi.

Tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- a Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi;
- b Melakukan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c Meningkatkan sistem pendataan/informasi/data statistik.

Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;
- b Peningkatan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel;
- c Peningkatan efektifitas program prioritas pembangunan.

Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ditetapkan sebagai berikut :

- a Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
- b Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan;
- c Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat-diklat;

c. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Malang

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air.

baru diresmikan pada tahun 2013 lalu itu bisa menghemat waktu perjalanan hingga 30 menit dan berhasil mengurai kemacetan di wilayah Kepanjen.

Proyek yang sudah dikerjakan sejak tahun 2008 itu awalnya digerojok dana Rp12,5 milyar, namun membengkak hingga 500 juta lebih banyak dari rencana semula. Tetapi, jalan sejauh lima kilometer itu kini sudah bisa dinikmati oleh semua orang. Ada dua jalur di jalan yang melewati dua desa yaitu desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung itu. Jalan yang besar dan terbilang baru tersebut merupakan sebuah rencana untuk mengembangkan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang.

Jalibar merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan kabupaten blitar. Jalibar mempunyai lebar total mencapai 26 meter dibagi menjadi dua lajur yang masing-masing lajur memiliki lebar sekitar tujuh meter dan panjang 5,6 km terbentang dari kepanjen hingga kecamatan ngajum yang melewati dua desa yaitu desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung. Salah satu tujuan dibangunnya Jalibar adalah untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di wilayah kepanjen.

Pembangunan Jalan Lingkar Barat diatur dalam Peraturan daerah kabupaten malang nomor 5 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan kepanjen tahun 2014-2034. Lebih lengkapnya dapat dilihat di Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen BAB IV yang telah disertakan oleh penulis di halaman lampiran.

B. Penyajian Data Fokus

1. **Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang**
- a. **Dampak Sosial Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang**

1. Pendidikan dan Kesehatan

- a) Pendidikan

Salah satu dampak sosial dari pembangunan Jalan Lingkar barat adalah meningkatnya fasilitas pendidikan di Desa Ngadilangkung. Sebelum adanya Jalan Lingkar Barat, sebagian masyarakat desa ngadilangkung tidak tertarik dengan yang namanya pendidikan. Kebanyakan dari masyarakat memiliki latar belakang pendidikan tamatan SD. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kepala Desa Ngadilangkung sabagai berikut:

“kalau di sana kemarin sebelum ada jalibar pendidikan rata rata sd, itu saja kadang sd berhenti, smp di tengah tengah berhenti, itupun di sana masih seperti itu. karna untuk pola sosial sudah kita motifasi kita kemarin desa kita mengajak yang belom kejar paket c dalam artian SMA akhirnya cuma 20 orang” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sifat individunya yang malas untuk meneruskan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bu endang salah satu warga desa Ngadilangkung sebagai berikut :

“... Kadang anaknya yang *gak* mau sekolah, orang tua nyuruh sekolah anaknya tidak mau. *Wes SMP ae* gitu loh mbak. Anaknya wes males mikir, mending kerja aja. banyak yang dapet kartu indonesia

pintar tidak mau sekolah karena suda enak kerja. ” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Salah satu peyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngadilangkung adalah karena keterbatasan sarana prasarana pendidikan. Sebelum adanya Jalan Lingkar Barat sarana dan prasarana pendidikan di desa sangatlah minim, sarana Pendidikan yang tersedia hanyah play group, taman kanak-kanak dan SD saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku Kepala Desa Ngadilangkung sebagai berikut:

“memang mbak, mungkin karena di desa cuma ada sekolah paling tinggi SD saja, jadi kalau mau lanjut SMP ya harus keluar desa. Makanya banyak yang berhenti sampai SD saja. dulu itu SD saja cuman ada satu mbak, kalau sekarang sudah mendingan, sudah ada SMP dan SMA, sudah ada perpustakaan sama taman baca juga. (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Hasil wawancara diatas dapat dierkuat dengan tabel sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ngadilangkung seperti di bawah ini.

Tabel 3 : sarana dan prasarana pendidikan

| Nama | Tahun | |
|--------------------------|-------|------|
| | 2007 | 2017 |
| Play Group | 1 | 1 |
| TK | 2 | 3 |
| SD | 1 | 2 |
| SMP | 0 | 2 |
| SMA | 0 | 1 |
| Lembaga Pendidikan Agama | 0 | 2 |
| Perpustakaan Desa | 0 | 1 |
| Taman Bacaan | 0 | 1 |

Sumber: Profil Desa Ngadilangkung

Sebelum adanya Jalan Lingkar Barat, sebagian masyarakat desa ngadilangkung tidak tertarik dengan yang namanya pendidikan. Kebanyakan dari masyarakat memiliki latar belakang pendidikan tamatan SD. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sifat individunya yang malas untuk meneruskan pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngadilangkung adalah karena keterbatasan sarana prasarana pendidikan. Sebelum adanya Jalan Lingkar Barat sarana dan prasarana pendidikan di desa sangatlah minim, sarana Pendidikan yang tersedia hanya play group, taman kanak-kanak dan SD saja. Namun dapat dilihat pada tabel di atas, setelah adanya jalan lingkar barat fasilitas pendidikan di desa ngadilangkung mulai bertambah.

b) Kesehatan

Sebelum adanya Jalan Lingkar Barat, di Desa Ngadilangkung belum ada sarana maupun prasarana kesehatan yang memadai. Jika ada masyarakat desa ngadilangkung yang sakit atau ingin melahirkan mereka lebih memilih mendatangi pengobatan tradisional atau Dukun Beranak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak majid selaku masyarakat desa Ngadilangkung sebagai berikut

“dulu itu sebelum ada jalan ini di dalam desa, puskesmas itu tidak ada mbak. Kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan dibawanya ke dukun beranak. Kalau engga ya ke kota mbak, ke kepanjen kan ada rumah sakit, tapi ya jauh mbak, mahal di ongkosnya juga jadinya mbak” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala desa ngadilangkung sebagai berikut:

“untuk fasilitas di desa sekarang sudah ada puskesmas pembantu, apotek dan sebagainya. Sebelumnya puskesmas pembantu saja belum ada. Jadi beberapa fasilitas kesehatan ini dibangun bareng sama pembangunan jalan, ada yang baru baru ini di bangun. Tapi untuk sekarang fasilitas kesehatan sudah cukup memadai mbak, masyarakat tidak perlu jauh jauh lagi pergi ke kepanjen atau ke desa lain.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Pernyataan di atas dapat diperkuat dengan Tabel Prasarana Kesehatan di Desa Ngadilangkung sebagai berikut.

Tabel 4: Prasarana Kesehatan

| Prasarana Kesehatan | Tahun | |
|------------------------------|-------|------|
| | 2007 | 2017 |
| Puskesmas Pembantu | 0 | 1 |
| Apotek | 0 | 1 |
| Balai Pengobatan Masyarakat | 1 | 4 |
| Rumah Bersalin | 0 | 1 |
| Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 | 1 |

Sumber: Profil Desa Ngadilangkung 2007, 2017

Fasilitas kesehatan di Desa Ngadilangkung sebelum pembangunan jalan lingkar barat sangatlah minim, hanya tersedia satu buah balai Pengobatan Masyarakat. Untuk berobat, masyarakat esa diharuskan keluar dari desa. Namun setelah pembangunan jalan lingkar barat masyarakat yang ingin berobat tidak perlu lagi keluar dari desa.

2. Mempermudah Akses Jalan

Salah satu point yang menjadi dampak dari pembangunan Jalan Lingkar Barat adalah Meningkatnya Rasa aman, tenang dan Rukun antar masyarakat desa ngadilangkung. Sebelum adanya jalan lingkar barat, akses jalan untuk ke desa ngadilangkung lebih susah. Untuk masyarakat yang akan berpergian ke lokasi lain atau untuk masyarakat yang akan melakukan kegiatan sehari ke luar desa ngadilangkung harus menempuh jalan yang lebih jauh dan memutar. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Ibu Endang salah satu masyarakat desa ngadilangkung sebagai berikut:

“Dulu itu kalau kemana mana susah mbak, saya dulu kan buruh rokok mbak, kalau mau kerja itu harus muter ke kepanjen dulu. Kalau sekarang kan enak mau kemana mana jadi gampang ga perlu muter jauh jauh lagi mbak.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Karena keterbatasan akses jalan yang ada di desa ngadilangkung menyebabkan jalanan sekitar ngadilangkung sepi. Keadaan jalan yang sepi sering dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab seperti perampokan, penjambreatan hingga tindak pemerkosaan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan bapak Slamet selaku kepala desa ngadilangkung sebagai berikut:

“Anak-anak muda di sini itu banyak yang sudah tidak mau sekolah tapi pergaulannya itu sudah tidak wajar, kaya udah memakai pil pil koplo, ngisep ganja, terus habis duitnya buat beli beli kaya begitu akhirnya mereka cari cara buat dapet duit biar bisa beli lagi, banyak yang akhirnya ngelakuin perampasan, njambret, nyuri ayam sering dulu anak muda diciduk karena seperti itu. ... dulu jalanan desanya sepi mbak yang dekat sawah sawah yang sekarang jadi

jalan itu, pernah ada remaja perempuan jalan sendiri langung dimasukin mobil buat digilir gitu mbak” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Seperti yang telah dijelaskan di atas pada saat belum dibangunnya jalan lingkaran barat masyarakat harus menempuh jarak yang memutar dan lebih jauh untuk melakukan aktifitas diluar desa Ngadilangkung. Kurangnya akses jalan tersebut menyebabkan kondisi jalan di desa menjadi sepi. Keadaan desa yang sepi sering dimanfaatkan beberapa orang yang tidak bertanggungjawab. Selain keadaan sekitar yang sepi, kurangnya pihak keamanan di desa ngadilangkung juga menjadi penyebab maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut diperjelas dalam hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala desa Ngadilangkung sebagai berikut:

“Karena ini desa kan mbak, jadi untuk keamanan masyarakat ya jadi tugas bareng-bareng. Hansip ada cuman satu orang saja mbak, kalo malam jaga giliran warganya. Jadi memang kurang juga kalau buat ngejaga seluruh desa ini mbak.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Pernyataan tersebut juga dapat diperjelas dari data tabel yang didapat peneliti dari Bapak Kepala Desa Ngadilangkung:

**Tabel 5. Jumlah Lembaga Keamanan di Desa Ngadilangkung
Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Lingkar
Barat (Jalibar)**

| No. | Lembaga Keamanan | Tahun | |
|-----|---|-----------|----------|
| | | 2008 | 2015 |
| 1. | Hansip | 1 orang | 3 orang |
| 2. | Satgas Linmas | 2 orang | 27 orang |
| 3. | Pelaksana Siskamling | 2 orang | 30 orang |
| 4. | Pos Kamling | 1 Pos | 15 Pos |
| 5. | Kerjasama Desa, Kelurahan dengan TNI /POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS | Tidak ada | 3 orang |

Sumber : Kepala Desa Ngadilangkung (2015)

Selain mempermudah akses jalan, pembangunan Jalan Lingkar Barat juga membantu masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Salah satunya telah dibangun sebuah taman yang diberi nama taman puspa. Adanya pembangunan Taman Puspa di desa ngadilangkung menjadi faktor pendorong tingkat sosial di masyarakat. Pendorong tingkat sosial di masyarakat dapat dilihat dari dibentuknya sebuah paguyuban masyarakat untuk mengelola taman puspa. Penjelasan tersebut dapat diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Slamet selaku Kepala Desa Ngadilangkung sebagai berikut:

“Di jalibar itu kan ada dibangun taman, namanya taman puspa, letaknya di desa ini mbak, di ngadilangkung. Jadi untuk pemeliharaan ya kami yang punya tugas. Jadinya supaya masyarakat sama-sama ngerawat, biar ga jadi konflik juga makanya kami bentuk paguyuban yang diberi nama SM (Swadaya Masyarakat).” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Paguyuban SM dibentuk untuk menyatukan tiap RW di desa Ngadilangkung. Paguyuban SM terdiri dari 15 RT dari 3 RW. Paguyuban ini dibentuk untuk mengelola Taman Puspa dan memelihara kerukunan antara masyarakat tiap RT di desa Ngadilangkung. Pernyataan tersebut dapat dipertegas dari hasil wawancara dengan salah satu warga desa Ngadilangkung yang bernama Saudara Anto sebagai berikut:

“Taman Ini dikelola sama warga mbak, ada paguyubannya namanya SM, itu anggotanya kurang lebih ada 40 orang gitu mbak, dari setiap RW di Ngadilangkung. mbak. Enak kalau ada paguyuban kaya gini mbak, jadi kalau ada apa apa bisa dirembuk bareng-bareng, bisa ngumpulin warga biar makin dekat juga tiap orangnya, terus sering juga kerja bakti di taman mbak.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Pernyataan di atas dapat dipertegas dari data tabel tentang jumlah anggota paguyuban yang didapat dari Saudara Anto salah satu anggota paguyuban SM sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Anggota Paguyuban SM di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang Tahun 2016

| No. | RW | Anggota | Jumlah | Rentang Usia | Koordinator |
|-------|----|---------|----------|--------------|-----------------------|
| 1. | 1 | 4 RT | 10 Orang | 35 - 60 | Joko Siswoyo |
| 2. | 2 | 5 RT | 13 Orang | 20 - 55 | Ratna Kusuma Ningdyah |
| 3. | 3 | 6 RT | 17 orang | 25 - 50 | Budi Santoso |
| Total | | | 40 Orang | | |

Sumber : Kepala Desa Ngadilangkung (2016)

Paguyuban SM diikuti oleh 15 RT dan anggotanya berjumlah 40 orang. Paguyuban SM berfungsi untuk mengelola taman puspa yang berada di wilayah desa ngadilangkung. Hasil dari pegelolaan taman puspa digunakan untuk kepentingan bersama.

3. Perubahan Perilaku Masyarakat

Pembangunan jalan lingkar barat menimbulkan dampak lebih tingginya mobilitas sosial yang ada di kawasan desa ngadilangkung. Namun tingginya mobilitas sosial menimbulkan dampak lain seperti masuknya budaya budaya baru yang menyebabkan pergeseran maupun perubahan perilaku masyarakat desa Ngadilangkung. Perubahan tersebut seperti penurunan interaksi sosial yang ada di desa ngadilangkung

“Dulu kalau tetangga ada yang kecelakaan bisa satu RT, janji-janji bareng bareng nemuin korban, tapi sekarang berkurang, masyarakat lebih sibuk dengan pekerjaannya sendiri sendiri” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Selain menurunnya interaksi sosial, mobilitas sosial di ngadilangkung juga menyebabkan beberapa pengaruh buruk di masyarakat desa ngadilangkung. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan ibu endang selaku warga desa ngadilangkung sebagai berikut

“menurunnya sopan santun generasi muda, anak-anak usia sekolah mengemudi motor tanpa memakai helm dan tersebarnya gambar-gambar maupun video berbaur pornografi mbak...” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Walaupun memiliki dampak positif, Pembangunan jalan lingkar barat di desa ngadilangkung juga membawa dampak negatif. Budaya gotong royong yang selalu ada di masyarakat desa perlahan luntur karena adanya perubahan perilaku masyarakat desa ngadilangkung.

b. Dampak Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang

1) Meningkatkan sentra-sentra perdagangan di sepanjang jalan lingkar barat (JALIBAR)

Salah satu dampak ekonomi pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) adalah meningkatnya sentra sentra perdagangan di sepanjang Jalan Lingkar Barat. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya jalibar, area tersebut merupakan lahan pertanian dan tegalan. Seiring dengan dibangunnya jalan lingkar barat, mulai bermunculan senta-sentra perdagangan disepanjang sisi Jalan Lingkar Barat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak majid salah satu warga desa Ngadilangkung:

“Saya bangun warung ini sejak jalan ini lagi dibangun, jadi barengan lah sama jalannya. Jadi pekerja pekerja yang lagi ngebangun kalau makan di sini. Terus di sepanjang jalan sekarang juga sudah banyak yang jualan kaya gini” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Selamat selaku Kepala Desa Ngadilangkung sebagai berikut:

“Dulu setelah dibangunnya jalibar dan taman puspa, kami memberikan modal ke beberapa kepala keluarga untuk membangun warung-warung di taman puspa, dulu dibangun sekitar 22 tapi sekarang sudah tinggal beberapa aja mbak yang lanjut.”

Meningkatnya sentra perdagangan tidak hanya berupa warung makan saja. selain warung makan, di jalan lingkar barat juga terdapat bengkel, pedagang bensin eceran, tempat pencucian mobil dan beberapa warung kelontong. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel yang didapat

dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Slamet selaku Kepala Desa Ngadilangkung sebagai berikut:

**Tabel 7. Jumlah Sentra Perdagangan di Desa Ngadilangkung
Kabupaten Malang setelah Adanya Pembangunan Jalan Lingkar
Barat (Jalibar)**

| No. | Keterangan | Sebelum Pembangunan Jalibar | Setelah Pembangunan Jalibar |
|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Warung Makan | Tidak Ada | 15 Warung |
| 2. | Toko Kelontong | Tidak Ada | 3 Toko Kelontong |
| 3. | <i>Car Wash</i> | Tidak Ada | 1 <i>Car Wash</i> |
| 4. | Bengkel | Tidak Ada | 1 Bengkel |
| 5. | Ruko | Tidak Ada | 6 Ruko |
| 6. | Warung Bensin Eceran | Tidak Ada | 4 Warung Bensin |

Sumber: Kepala Desa Ngadilangkung

Salah satu dampak ekonomi dari pembangunan jalan lingkar barat adalah meningkatnya sentra perdagangan di desa ngadilangkung. Sentra perdagangan yang ada tidak hanya warung saja melainkan ada juga bengkel, ruko, maupun tempat cuci mobil.

2) Meningkatnya harga tanah

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga bukan meningkatnya sentra perdagangan saja. Salah satu dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya harga jual tanah di Desa Ngadilangkung. Harga jual tanah di desa ngadilangkung mulai mengalami kenaikan yang signifikan setelah adanya jalan lingkar barat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Majid salah satu warga Desa Ngadilangkung sebagai berikut

“Kalau saya sendiri ngerasa dampaknya itu ada tapi tidak terlalu signifikan mbak, kalo saya sih ngeliatnya dampak yang paling

terasa itu harga tanahnya. Dulu harga tanah Cuma berapa, 10 ribu per meter sekarang sudah lumayan mahal di sini” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala desa Ngadilangkung sebagai berikut

“dulu yang sawahnya waktu pembebasan laku 10rb/meter sekarang tanah di daerah itu bisa jadi 500/meter bisa diatas itu juga. Sekarang harga tanahnya mulai naik. Karena tidak semua warga sini punya tanah jadi ya dampaknya tidak dirasakan semua warga.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Kenaikan harga tanah tersebut dapat dibuktikan dari hasil observasi penulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8.Harga Satuan Tanah di Desa Ngadilangkung

Kabupaten Malang pada Tahun 2012 Hingga Tahun 2016

| No | Jenis Tanah | Tahun (m ²) | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Darat di pinggir jalan desa | Rp400.000 | Rp500.000 | Rp650.000 | Rp750.000 | Rp850.000 |
| 2. | Sawah di pinggir jalan desa | Rp500.000 | Rp600.000 | Rp700.000 | Rp850.000 | Rp950.000 |
| 3. | Darat di dalam | Rp250.000 | Rp300.000 | Rp450.000 | Rp550.000 | Rp600.000 |
| 4. | Sawah di dalam | Rp150.000 | Rp200.000 | Rp250.000 | Rp350.000 | Rp450.000 |

Sumber: Kepala Desa Ngadilangkung

Meningkatnya harga tanah di desa ngadilangkung merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan lingkar barat. Kenaikan harga tanah di desa ngadilangkung mencapai 2 kali lipat dari harga tanah sebelum dibangunnya jalan lingkar barat.

- 3) Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat dari Sektor pertanian menjadi sektor Industri dan Perdagangan

Perubahan mata pencaharian masyarakat juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan setelah dibangunnya jalan lingkar barat. Sebelum adanya jalan lingkar barat, sebagian besar masyarakat desa ngadilangkung berprofesi sebagai petani maupun buruh tani. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku Kepala Desa Ngadilangkung sebagai berikut:

“masyarakat desa sini ya kebanyakan petani mbak, soalnya banyak yang sekolah ga selesai terus orang ga punya, jadi ya mereka milih jadi petani kerjanya.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) membawa dampak pada penciptaan lapangan kerja terutama bagi penduduk desa Ngadilangkung baik pada saat pembangunan jalan maupun untuk jangka panjang. Penciptaan kesempatan kerja dalam hal ini bisa dilakukan dengan membuka usaha-usaha baru di sepanjang jalan lingkar barat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku kepala desa Ngadilangkung berikut ini:

“Pada saat pembangunan jalan banyak warga yang nganggur ikut bantu bantu jadi kulinya, jadi ya ada pemasukan lain untuk masyarakat. ... menguntungkan karena minimal kita akses keterbukaan orang akhirnya tau, akhirnya kita berfikirnya sedikit erubah, kalau dulu kan tani, buruh tani itu saja, mungkin dengan adanya jalibar dia mempunyai motifasi lain. ya itu tadi seperti pak kepala desa yang dulu sekarang punya tempat cuci mobil dan kopi. ibu kasiati yang dulu cuma warga biasa sekarang punya warung. yang kedua yang dulunya tidk kerja, kerja di toko bangunan, rumah makan, buka warung di taman puspa. jadi sedikit ada perubahan namun tidak signifikan.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Penciptaan lapangan kerja baru juga dirasakan oleh bapak soikoni salah satu warga desa ngadilangkung sebagai berikut:

“saya dulu buruh tani mbak, dapet duit ya kalo lagi panen atau pas nanem saja, kalau tidak ada kerjaan ya saya nganggur saja di rumah mbak.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Dengan adanya Jalan Lingkar Barat, perekonomian masyarakat desa Ngadilangkung mulai meningkat. Banyak warga yang awalnya menjadi Petani, Buruh Tani atau pengangguran sekarang mulai beralih profesi. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 9 . Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalibar)

| No. | Pekerjaan / Mata Pencaharian | Sebelum Pembangunan Jalibar | Setelah Pembangunan Jalibar |
|-----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Petani | 463 orang | 131 orang |
| 2. | Buruh Tani | 621 orang | 130 orang |
| 3. | Buruh Pabrik | 33 orang | 325 orang |
| 4. | PNS | 5 orang | 115 orang |
| 5. | Buruh Migran | 25 orang | 336 orang |
| 6. | Peternak | 8 orang | 4 orang |
| 7. | Pedagang Kelontong | 2 orang | 75 orang |
| 8. | Montir | 2 orang | 10 orang |
| 9. | Dokter Swasta | 1 orang | 4 orang |
| 10. | Perawat Swasta | 1 orang | 14 orang |
| 11. | Bidan Swasta | 1 orang | 5 orang |
| 12. | TNI | 2 orang | 29 orang |

| | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|
| 13. | Polri | 4 orang | 28 orang |
| 14. | Pengusaha Kecil Menengah Besar | 3 orang | 115 orang |
| 15. | Guru Swasta | 15 orang | 70 orang |
| 16. | Dosen Swasta | 0 orang | 5 orang |
| 17. | Pedagang Keliling | 9 orang | 63 orang |
| 18. | Buruh Harian Lepas | 47 orang | 409 orang |
| 19. | Pengrajin industri Rumah Tangga | 0 orang | 2 orang |
| 20. | Tidak Bekerja (Pengangguran) | 2.762 orang | 1.810 orang |

Sumber : Kepala Desa Ngadilangkung (2016)

Sebelum dibangun Jalan Lingkar Barat sebagian besar masyarakat desa ngadilangkung berprofesi sebagai petani maupun buruh tani. Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) membawa dampak pada penciptaan lapangan kerja terutama bagi penduduk desa Ngadilangkung baik pada saat pembangunan jalan maupun untuk jangka panjang. Dengan adanya Jalan Lingkar Barat, perekonomian masyarakat desa Ngadilangkung mulai meningkat. Banyak warga yang awalnya menjadi Petani, Buruh Tani atau pengangguran sekarang mulai beralih profesi.

4) Tingginya Polusi dan Tingkat kebisingan

Salah satu dampak negatif yang muncul dari pembangunan jalan lingkar barat adalah, meningkatnya polusi udara di sekitar jalan lingkar barat maupun desa ngadilangkung, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Selamat selaku kepala desa ngadilangkung

“Sebelum ada jalan di situ kan sawah mbak, jadi polusinya dulu tidak seberapa, tapi sekarang kan banyak kendaraan berat kayak truk, bus, mobil pribadi yang lalu lalang di sekitar jalan itu jadi

meimbulkan polusi di sana mbak” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Selain peningkatan polusi udara, di sekitar jalan juga mengalami kenaikan kebisingan diakibatkan kendaraan bermotor, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Selamat selaku kepala desa Ngadilangkung

“sekarang itu desa jadi lebih ramai mbak, ekonomi juga meningkat, tapi karena ramai tersebut desa ini jadi lebih bising mbak, banyak kendaraan yang lewat, kadang juga ada yang kenalpotnya diganti jadinya lebih ising mbak” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Mobilitas sosial yang meningkat, Ekonomi masyarakat yang meningkat merupakan beberapa dampak positif dari pembangunan jalan, namun di sisi lain ada pula dampak negatif yang dirasakan masyarakat, salah satunya adalah adanya kenaikan tingkat polusi maupun kebisingan di wilayah desa ngadilangkung.

2. Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang

1) Bertambah dan Berkurangnya penduduk

Salah satu faktor dari dalam atau faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial ekonomi di desa ngadilangkung adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Jumlah penduduk di desa

ngadilangkung mengalami peningkatan setiap taunnya. Hal tersebut dapat diperjelas dari hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku kepala desa ngadilangkung sebagai berikut

“untuk desa kita ini banyak kelahirannya mbak, karena masyarakatnya khususnya anak muda banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Jadi tiap tahun makin meningkat jumlah penduduk di desa ini.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilangkung)

Peningkatan jumlah penduduk juga disebabkan oleh dibangunnya beberapa perumahan di wilayah desa ngadilangkung. Salah satu perumahan yang dibangun pemerintah adalah perumahan PNS untuk para pegawai PNS yang bekerja di wilayah kepanjen dan sekitarnya. Hal tersebut dapat diperjelas dari hasil wawancara dengan bapak herman selaku pegawai bappeda kabupaten malang sebagai berikut :

“Selain jalan, fasilitas lain yang dibangun oleh pemerintah adalah taman dan perumahan. ... perumahan PNS yang ada di wilayah ngadilangkung. Perumahan PNS dibuat untuk mempermudah karyawan yang rumahnya jauh dari wilayah kepanjen.” (Wawancara pada tanggal 04 Mei 2017 di Kantor BAPPEDA)

Peningkatan jumlah penduduk di desa ngadilangkung tidak sekedar dari jumlah kelahiran saja. adanya perumahan PNS yang dibangun pemerintah juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk di desa ngadilangkung.

2) Konflik dalam masyarakat

Salah satu faktor internal perubahan sosial ekonomi di desa ngadilangkung adalah adanya konflik dalam masyarakat. Konflik antar masyarakat tersebut terjadi pada saat pembebasan tanah milik masyarakat.

ketidakpuasan masyarakat terhadap harga yang diberikan pemerintah pada saat pembebasan lahan menyebabkan terjadinya perselisihan antara masyarakat dan aparat pemerintah. Pemerintah dalam pembangunan jalan lingkaran barat melakukan pembebasan lahan di tiga desa yaitu desa Mojosari, desa Ngadilankung dan desa Ngasem. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan, masyarakat desa Mojosari sempat tidak setuju dengan harga yang diberikan pemerintah pada saat pembebasan lahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Majid salah satu masyarakat desa ngadilankung yaitu:

“Jadi gini *mbak*, waktu pembebasan tanah itu *mbak* sempet jalan masuknya itu mau dibelokin gak lewat jalan ini *mbak*. Orang-orang desanya gamau kalau lahannya dihargai cuman segitu aja, waktu itu dihargain cuman 10-30 ribu aja per meternya *mbak*. Jadi waktu pembangunan itu di bagian ngadilankung diselesain dulu sambil nungguin pelepasan tanah di mojo *mbak*, nah setelah orang desanya mau baru dibangun jalan lewat mojosari itu *mbak*.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilankung)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Slamet selaku kepala desa Ngadilankung dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Jalan itu dulu kan sawah sama tegalan. Jadi kalau dulu harga sawah lakunya di situ ga bisa banyak, cuman 10 ribu per meter, sekarang bisa 500 ribu kalau kecil. Waktu pembebasan dari pemerintah paling mahal 40 ribu per meternya.” (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2017 di Kantor Desa Ngadilankung)

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Soikoni salah satu masyarakat desa ngadilankung dalam hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“*waduh* *mbak*, murah hargane tanah pas pembebasan lahan. *misale* aku *nduwe* tanah *akeh* yo untung *mbak*, tapi *lek* tanahku *sitik* yo

nggak jadi apa apa mbak, habis buat sehari hari.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2017 di Desa Ngadilangkung)

Dalam pembebasan lahan pada saat pembangunan Jalan Lingkar Barat harga yang diberikan oleh pemerintah dirasa terlalu murah oleh masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas terkait harga ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Pada saat awal pembebasan tanah pada tahun 2008 harga yang diberikan pemerintah hanya berkisar 10 ribu – 40 ribu per meter dan untuk masyarakat yang hanya memiliki lahan dengan luas tanah yang kecil maka tidak mendapat pengaruh ataupun keuntungan dari pembebasan lahan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari tabel harga tanah di bawah ini

C. Pembahasan

1. Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang

a. Dampak Sosial Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang

Menurut Kodoatie (2005 : 269) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar pedesaan Infrastruktur”, pembangunan jalan menimbulkan dampak ke beberapa aspek sosial masyarakat antara lain seperti membuka akses bagi perumahan pedesaan terhadap pusat kesehatan, pendidikan dan sebagainya dan juga meningkatkan aktivitas sosial antar masyarakat yang menerima dampak pembangunan.

1) Pendidikan dan Kesehatan

Membuka akses bagi perumahan pedesaan terhadap pusat kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan jalan baru biasanya menghubungkan antara perumahan dengan berbagai fasilitas publik seperti perkantoran,

pendidikan, maupun kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan baru tersebut semakin mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas publik tersebut baik pendidikan maupun kesehatan. Kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan maupun kesehatan tersebut akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan di desa ngadilangkung mengenai Dampak sosial yang terjadi di masyarakat setelah pembangunan jalan lingkaran barat sesuai dengan apa yang dikatakan kodoatie dalam teorinya di atas. Dengan mudahnya akses masyarakat terhadap fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan di masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti di atas.

Mudahnya akses jalan meningkatkan kualitas pendidikan di desa ngadilangkung. Sebelum adanya jalan Lingkaran barat, fasilitas pendidikan yang ada di desa ngadilangkung hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD). Kurangnya fasilitas tersebut mengakibatkan banyak masyarakat desa ngadilangkung yang enggan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain kurangnya fasilitas pendidikan, apabila ada masyarakat yang ingin bersekolah di luar desa mengalami kesulitan lain yaitu susah akses jalan. Masyarakat diharuskan berjalan memutar untuk dapat menuju lokasi lain.

Dengan adanya pembangunan jalan tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan di desa ngadilangking. Kualitas kesehatan di desa ngadilangkung juga mulai mengalami peningkatan setelah adanya jalan Lingkar Barat tersebut. Dibangunnya jalan lingkar barat yang dibarengi dengan pembangunan beberapa fasilitas menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat. Sebelum adanya jalan lingkar barat, masyarakat yang sakit hanya bisa menggunakan obat-obatan yang ada dijual bebas di toko atau ke tempat pengobatan tradisional karena terbatasnya fasilitas kesehatan di desa ngadilangkung.

Setelah pembangunan jalan lingkar barat akses jalan di desa ngadilangkung semakin baik. Masyarakat desa ngadilangkung tidak perlu jalan memutar apabila ingin berpergian ke luar desa untuk bersekolah atau pergi ke rumah sakit. Selain itu fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa ngadilangkung juga meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan aktivitas sosial

Meningkatkan ikatan sosial dan integrasi nasional. Pembangunan jalan ditujukan untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. dengan demikian akan membuka daerah-daerah yang terisolir. Selain itu, dengan adanya jalan yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain akan semakin mempermudah pergerakan masyarakat suatu daerah menuju ke daerah lain di sekitarnya. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan baru tersebut akan semakin meningkatkan pergerakan/ mobilisasi masyarakat suatu daerah. Dengan adanya peningkatan mobilisasi tersebut secara tidak langsung

akan berdampak terhadap tingkat interaksi masyarakat. Masyarakat suatu daerah tertentu akan lebih sering melakukan interaksi dengan masyarakat lain di sekitarnya. Dengan demikian akan menimbulkan ikatan sosial antar masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan integritas sosial

Sesuai dengan teori kodoatie di atas bahwa dengan adanya pembangunan jalan maka akan menimbulkan ikatan sosial di antara masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti di desa ngadilangkung sesuai dengan pernyataan kodoatie di atas. Dengan adanya pembangunan jalan lingkar barat akan mempermudah akses juga untuk masyarakat desa ngadilangkung maupun masyarakat lain yang melewati jalan lingkar barat.

Dengan adanya jalan lingkar barat, masyarakat desa ngadilangkung tidak perlu melakukan perjalanan yang memutar untuk keluar desa. Selain tidak perlu melakukan perjalanan yang memutar, dampak lain yang ditimbulkan dari pembangunan jalan adalah wilayah desa ngadilangkung menjadi lebih ramai. Apabila sebelumnya warga harus berjalan memutar, mengakibatkan beberapa wilayah di desa ngadilangkung menjadi rawan dengan tindak kejahatan. Untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan di desa ngadilangkung maka dibentuk linmas dan dilakukan ronda malam. Dengan adanya aktivitas tersebut juga dapat meningkatkan aktifitas sosial antar masyarakat.

3) Perubahan Perilaku Masyarakat

Pola interaksi antarmanusia yang berubah. Kemudahan berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam saat ini telah merubah pola interaksi

keluarga. Program internet, dan email telah membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program Internet anak-anak bisa asyik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. hal tersebut menyebabkan rendahnya interaksi sosial di masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Interaksi antar manusia ini akhirnya membutuhkan kesepakatan bersama untuk menghasilkan norma-norma sosial yang dibutuhkan penduduk yang mengatur hubungan antar penduduk dalam rangka harmonisasi sosial. Salah satu interaksi sosial penduduk yang ada di pedesaan yang secara tradisional sudah terbentuk sejak lama dan turun temurun adalah gotong-royong. Interaksi sosial ini terbentuk secara alamiah dalam masyarakat, sebagai bentuk pertahanan kolektif penduduk dalam masyarakat, sebagai bentuk pertahanan kolektif penduduk dalam mengatasi masalah bersama.

Kurangnya interaksi sosial menyebabkan kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani.

Miskin dalam rohani di kalangan remaja menyebabkan kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat karena lemahnya kewibawaan tradisitradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan sentripetal yang

berperan pen-ting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjut bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, corat-coret, pelanggaran lalu lintas sampai tindak kejahatan

b. Dampak Ekonomi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di desa Ngadilangkung Kabupaten Malang

Dalam Kodoatie (2005 : 269) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar pedesaan Infrastruktur”, pembangunan jalan menimbulkan dampak ke beberapa aspek ekonomi dalam masyarakat antara lain seperti membuka kesempatan kerja, meningkatkan pasokan barang-barang konsumsi dengan harga lebih murah, dan pembangunan pertanian dengan hasil yang lebih tinggi.

1) Meningkatkan pasokan barang-barang konsumsi dengan harga lebih murah

Meningkatkan pasokan barang barang konsumsi dengan harga yang lebih murah. Pembangunan jalan baru akan mempermudah dan memperlancar pendistribusian barang barang konsumsi kemudahan dan kelancaran pendistribusian barang barang konsumsi tersebut secara tidak langsung akan menekan biaya distribusi dan meningkatkan pasokan barang-barang konsumsi dengan biaya distribusi yang dapat ditekan dan peningkatan pasokan tersebut mengakibatkan harga barang konsumsi lebih murah

Dengan adanya jalan lingkar barat, pendistribusian barang konsumsi menjadi lebih mudah. Apabila sebelumnya masyarakat harus melakukan perjalanan memutar dan dalam pendistribusian mengakibatkan tingginya ongkos jalan mengakibatkan harga jual yang menjai lebih tinggi. Harga jual yang tinggi

membuat masyarakat desa ngadilangkung tidak banyak yang membuka toko maupun warung.

Seiring dengan kemudahan akses jalan setelah dibangunnya jalan lingkaran barat, pemerintah juga membangun taman yang bernama taman puspa. Taman puspa dibangun pemerintah selain untuk meningkatkan interaksi sosial juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan ekonomi di masyarakat terjadi karena adanya warung-warung di taman puspa maupun di sepanjang Jalan lingkaran barat.

Kemudahan akses jalan yang dirasakan masyarakat membuat banyak warga masyarakat yang mulai membuka toko. Kemudahan akses jalan saat ini membuat biaya distribusi yang lebih rendah. Biaya distribusi yang rendah membuat para pedagang menjadi lebih untung pada saat penjualan barang-barang konsumsi. Dengan lebih tingginya keuntungan masyarakat maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa ngadilangkung juga.

2) Pembangunan pertanian dengan hasil yang lebih tinggi

Apabila dalam bukunya Kodoatie menyebutkan bahwa dengan dibangunnya sebuah jalan maka akan berdampak positif pada hasil pertanian, pembangunan pertanian dengan hasil yang lebih tinggi perubahan guna lahan peningkatan penggunaan kebutuhan pertanian yang lebih modern dan peningkatan produksi untuk dipasarkan di bidang pertanian. Pembangunan jalan baru akan menimbulkan perubahan terhadap penggunaan lahan. Pembangunan jalan baru tidak jarang akan mengurangi luas lahan pertanian pembangunan. Jalan baru juga

akan mendorong pembangunan fasilitas umum seperti perkantoran, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Selain itu dengan adanya pembangunan jalan baru akan mendorong masyarakat luar untuk masuk ke daerah tersebut dan melakukan aktivitas ekonomi. Dengan masuknya masyarakat dari luar akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan fasilitas perumahan dengan demikian akan terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan, maupun perkantoran, tempat ibadah, maupun sekolahan. Selain itu pembangunan jalan baru akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap lahan pertanian dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengangkutan hasil pertanian kemudahan tersebut akan mendorong pembangunan di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil pertanian. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti.

Dengan adanya Jalan Baru mengakibatkan semakin sedikitnya lahan pertanian yang ada di wilayah Desa ngadilangkung. lahan pertanian tersebut beralih fungsi menjadi jalan dan perumahan baru apabila dikatakan bahwa pembangunan jalan baru mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pengangkutan hasil pertanian hal tersebut dapat dibenarkan namun setelah dibangunnya Jalan Lingkar Barat masyarakat desa ngadilangkung banyak yang beralih profesi dari petani menjadi pedagang maupun bekerja di pabrik sehingga mengakibatkan berkurangnya petani di desa ngadilangkung selain berkurangnya petani berkurangnya lahan pertanian juga mengakibatkan menurunnya tingkat hasil pertanian di desa ngadilangkung

Dari sisi ekonomi dapat dilihat bahwa hasil pertanian di desa ngadilangkung memang tidak begitu meningkat. Berbeda dengan harga tanah yang ada di desa ngadilangkung. Setelah pembangunan jalan harga tanah di desa ngadilangkung semakin naik. Jika sebelum adanya Jalan Lingkar Barat harga tanah hanya berkisar Rp30.000 per meter sekarang harga tanah sudah naik hingga 200%.

3) Membuka kesempatan kerja

Dibangunnya jalan lingkar barat berdampak pada bidang ekonomi. dampak tersebut salah satunya adalah membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja tersebut tidak hanya pada tahap pelaksanaan konstruksi saja, kesempatan kerja tersebut juga membuka kesempatan kerja yang berkepanjangan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kodoatie dengan dibangunnya jalan lingkar atau jalan baru maka dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Di desa ngadilangkung sendiri kesempatan kerja tersebut muncul mulai pelaksanaan konstruksi atau pada saat pembangunan jalan lingkar barat. Kesempatan kerja pada saat pelaksanaan konstruksi terjadi ketika masyarakat diminta untuk ikut serta dalam pembangunan jalan. Seperti kalangan muda yang ikut menjadi kuli pada saat pembangunan jalan

Kesempatan kerja yang ada di desa ngadilangkung tidak hanya pada saat pelaksanaan konstruksi saja. banyak kesempatan kerja lain yang ditimbulkan Setelah pembangunan Jalan Lingkar Barat. Kesempatan kerja tersebut seperti perubahan pekerjaan masyarakat dari yang hanya bekerja sebagai petani menjadi

berbagai macam seperti menjadi buruh pabrik menjadi pelayan di warung maupun membuka warung sendiri.

4) Meningkatnya Tingkat Polusi dan Kebisingan

Jika ditinjau dari segi fungsi, maka pembangunan prasarana jalan tentu harus dapat memberikan dampak yang positif terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam Teori Robert K. Merton hal seperti itu termasuk ke dalam fungsi manifest (yang diharapkan) dari dilaksanakannya pembangunan prasarana jalan. Tetapi ada kalanya dalam pembangunan yang dilaksanakan timbul dampak – dampak yang tidak diharapkan (fungsi laten). Keduanya ini merupakan suatu konsekuensi yang kuat dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan adanya jalan lingkar barat yang melewati desa ngadilangkung, masyarakat pada saat ini menjadi lebih mudah dalam melakukan aktivitas / pergerakan, penjualan dan pemasaran hasil produksi pertaniannya. Tidak ada lagi batasan masyarakat dalam berbagai aktivitasnya mengingat bahwa pada saat ini sarana transportasi seperti mobil pengangkutan umum juga telah banyak tersedia dan selalu beroperasi tanpa ada batasan waktu. Namun terdapat fungsi laten atau dampak yang tidak diharapkan seperti meningkatnya polusi dan kebisingan di wilayah desa ngadilangkung.

2. Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Lingkar Barat (JALIBAR) di Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang

Dalam bukunya yang berjudul “Modernisasi dan perubahan sosial” kanto mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar masyarakat yang bersangkutan.

a. **Faktor internal**

Dalam kanto (2006:11), disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang bersumber dari dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor tersebut antara lain adalah inovasi, penduduk, gerakan sosial, dan konflik sosial. Namun dalam pembahasan ini penulis hanya menggunakan faktor penduduk dan konflik sosial saja.

1) Penduduk

Pengaruh langsung dari penduduk terhadap perubahan sosial terutama terkait dengan perubahan jumlah penduduk dan strukturnya (misalnya menurut golongan umur). Perubahan jumlah penduduk akan berpengaruh dengan segala segi kehidupan masyarakat, misalnya pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pada prinsipnya, perubahan jumlah penduduk disuatu daerah dipengaruhi oleh empat unsur, yaitu kelahiran (*Birth*), kematian (*Death*), migrasi masuk (*in migration*) dan migrasi keluar (*Out migration*). Kelahiran dan migrasi masuk akan menambah, sebaliknya kematian dan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan teori bahwa pertumbuhan penduduk mempengaruhi suatu daerah untuk melakukan perubahan hal tersebut juga terjadi di Desa

ngadilangkung . Jumlah penduduk di desa ngadilangkung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya hal tersebut tidak hanya dari peningkatan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan dari tingkat kelahiran yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk juga disebabkan karena adanya pembangunan Perumahan PNS sehingga banyak masyarakat yang dari luar Desa ngadilangkung berpindah menjadi warga desa ngadilangkung.

2) Konflik Sosial

Konflik sosial dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selain itu konflik sosial juga dapat terjadi karena perbedaan dari pemikiran masyarakat tradisional dan pemikiran masyarakat yang bersifat lebih modern.

Konflik sosial yang terjadi di Desa ngadilangkung disebabkan oleh perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan harga pada saat pembebasan tanah. Beberapa masyarakat merasa kurangnya kesepakatan yang diberikan oleh pemerintah pada saat pembebasan tanah. Konflik lain yang terjadi di desa ngadilangkung adalah adanya ketidak sesuaian pembuatan sertifikat tanah baru yang dijanjikan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis dapat mengungkapkan beberapa kesimpulan dari Dampak Sosial dan Ekonomi pembangunan Jalan Lingkar Barat di Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang adalah :

1. Pembangunan Jalan Lingkar Barat menimbulkan dampak bagi masyarakat baik dampak sosial maupun dampak ekonomi di mana dampak sosial yang ada setelah dibangunnya jalan lingkar barat adalah meningkatnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di desa ngadilangkung , mempermudah akses jalan untuk masyarakat yang ingin berpergian keluar desa. Selain dampak sosial terdapat pula dampak ekonomi yang disebabkan atau yang timbul setelah adanya Jalan Lingkar Barat yaitu meningkatnya sentra-sentra perdagangan di sepanjang Jalan Lingkar Barat meningkatnya harga tanah , nimbulkan perubahan Mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan perdagangan. Jalan Lingkar Barat telah membantu keberlangsungan hidup masyarakat seperti mempermudah akses ke daerah lain , mengurangi kemacetan di wilayah perkantoran Kepanjen , meningkatkan penghasilan warga sekitar , kesempatan kerja bertambah dan perekonomian warga yang meningkat

2. Ada pula faktor yang menyebabkan perubahan sosial maupun ekonomi Setelah pembangunan Jalan Lingkar Barat adalah dapat pertambahan dan berkurangnya penduduk dari desa ngadilangkung dan adanya konflik dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan data yang telah didapat dari hasil penelitian langsung terhadap Jalan Lingkar Barat Kabupaten Malang maka penulis bermaksud akan mengajukan saran-saran agar menjadikan jalur Lingkar Barat lebih bermanfaat dan lebih baik lagi , Adapun sarannya adalah sebagai berikut :

Untuk masyarakat sekitar Jalan Lingkar Barat agar dapat memanfaatkan jalan tersebut secara maksimal, masih banyak lahan kosong yang masih bisa dibangun rumah makan maupun toko sehingga dapat menambah penghasilan warga sekitar karena Jalan Lingkar Barat merupakan jalan alternatif menuju daerah pariwisata seperti Gunung Kawi. Selain itu tidak hanya masyarakat dari dalam daerah saja yang melalui Jalan Lingkar Barat ada pula masyarakat yang berasal dari luar daerah menggunakan jalur tersebut maka apabila warga dapat memanfaatkan dengan membuka fasilitas seperti rest area dan sebagainya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2009. Jurnal: *Snapshot Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Pengentasan Kemiskinan*, diakses tanggal 12 Juni 2017 melalui http://Snapshot_Dampak_Kebijakan_Publik_Dalam_Program_Pengentasan_Kemiskinan.htm
- Ardyasworo, Sri W.P. 2011. Skripsi: *Dampak sosial ekonomi dari kebijakan pembangunan pariwisata (Studi pada pembangunan wisata makam bung karno kota blitar)*.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Jacobus, Ranjabar. 2008. *Perubahan Sosial dalam Teori Makro : Pendekatan Realitas Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Keban, Yeremis T. 2004. *Enam Dimensi Strategis administrasi Publik: Konsep teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kodoatie, J. Robert. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah buku sumber (Edisi Kedua)*. Thousand Old, CA: Sage Publications.
- Moleong, J. Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Suryono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma, Model Pedekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Lembaga Penerbit dan Dokumentasi Fia-UB

- Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Perda Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen tahun 2014-2034
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan

LAMPIRAN

| Formulasi Masalah | |
|---------------------|---|
| a. | Bagaimanakah proses kebijakan pembangunan jalibar di kabupaten malang? |
| b. | Apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan? |
| c. | Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? |
| Formulasi Kebijakan | |
| a. | Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? |
| b. | Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? |
| Penentuan Kebijakan | |
| a. | Bagaimana alternatif kebijakan? |
| b. | Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? |
| c. | Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? |
| d. | Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? |
| e. | Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan? |
| Implementasi | |
| a. | Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? |
| b. | Apa yang mereka kerjakan? |
| c. | Apa dampak dari isi kebijakan? |
| Evaluasi | |
| a. | Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak diukur |
| b. | Siapa yang mengevaluasi kebijakan? |
| c. | Apa kosnsekuensi dari adanya kebijakan? |

Nama Narasumber _____ : Hari/Tanggal _____ :
 Jabatan Narasumber _____ : Jam _____ :

1. Bagaimanakah Proses Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat?
2. Bagaimana Dampak Proses Kebijakan Pembangunan JALIBAR?

| | |
|----|--|
| a. | Bagaimanakah dampak proses kebijakan JALIBAR pada kehidupan ekonomi masyarakat? |
| b. | Bagaimanakah dampak proses kebijakan JALIBAR pada proses kebijakan yaitu apa yang akan dilakukan pada kebijakan selanjutnya? |
| c. | Bagaimanakah dampak proses kebijakan JALIBAR pada sikap publik? |
| d. | Bagaimanakah dampak proses kebijakan JALIBAR pada kualitas masyarakat yang bersifat non ekonomi (kehidupan sosial masyarakat)? |

| |
|--------------------------|
| DAFTAR PERTANYAAN |
|--------------------------|

DOKUMENTASI

